

**KEBUTUHAN DAN JANGKAUAN PELAYANAN  
PENDIDIKAN DI KECAMATAN BANDONGAN  
KABUPATEN MAGELANG**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota**

Oleh :  
**WIDIANANTARI**  
L4D 006 097



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2008**

**JANGKAUAN PELAYANAN SMA NEGERI BANDONGAN  
SEBAGAI FASILITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN  
MAGELANG**

Tesis diajukan kepada  
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :  
**WIDIANANTARI**  
L4D 006 097

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal Agustus 2008

Dinyatakan lulus  
Sebagai syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 12 September 2008

Pembimbing II

Pembimbing I

Yudi Basuki, ST,MT

Dra.Bitta Pigawati, MT

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Dr.Ir. Joesron Ali Syahbana, M.Sc

## **ABSTRAK**

*Pembangunan pendidikan nasional tidak dapat lepas dari perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun global. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global .*

*Di wilayah Kabupaten Magelang fasilitas pendidikan yang berkaitan dengan tingkat pelayanan sekolah belum merata, sehingga menimbulkan banyaknya anak lulusan SMP Kabupaten yang tidak tertampung atau melanjutkan ke jenjang selanjutnya, anak putus sekolah terutama di daerah–daerah tertinggal. Untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang terjangkau bagi semua penduduk perlu ditempuh melalui pendidikan formal.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji jangkauan pelayanan SMA Negeri Bandongan sebagai fasilitas pendidikan menengah di pedesaan . Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan (question research):“Bagaimana jangkauan pelayanan SMA Negeri Bandongan sebagai fasilitas pendidikan menengah di pedesaan ?”*

*Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis Jangkauan pelayanan pendidikan, analisis Angka Partisipasi Kasar (APK), analisis Angka Partisipasi Murni (APM), analisis Tingkat Pelayanan Sekolah, dan analisis rasio siswa per kelas.*

*Hasil analisis menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) Kecamatan Bandongan sebesar 20,90 %, Angka Partisipasi Murni (APM) Kecamatan Bandongan sebesar 15,40 %, dan Jangkauan pelayanan SMA Negeri Bandongan sebagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Magelang sudah dapat menjangkau pelayanan pendidikan di wilayah Kecamatan Bandongan bahkan sampai keluar kecamatan. Dari hasil analisis sebenarnya masih ada 2 SLTP di Kecamatan Bandongan yang belum bisa tertampung.*

*Berdasarkan hasil penelitian bahwa meskipun jangkauan pelayanan SMA Negeri Bandongan sebagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Magelang sudah bisa menjangkau di wilayah tersebut bahkan keluar wilayah kecamatan, namun masih ada 2 SLTP wilayah kecamatan Bandongan yang belum bisa terlayani*

*Sesuai dengan hasil penelitian dapat direkomendasikan bahwa fasilitas pendidikan di Kecamatan Bandongan khususnya untuk tingkat Sekolah Menengah Atas masih perlu penambahan ruang kelas baru untuk menampung kelebihan siswa , alternatif pendidikan lain bahkan pendirian Unit Sekolah Baru di wilayah Kecamatan Bandongan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan.*

*Kata kunci : jangkauan pelayanan, fasilitas pendidikan, Kec. Bandongan, Kab. Mgl*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, petunjuk dan bimbinganNya sehingga penulis dapat menyusun Tesis pada Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Dr.Ir. Joesron Ali Syahbana, M.Sc, Ketua Program Studi MTPWK Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
2. Dra. Bitta Pigawati,MT selaku pembimbing utama dan Yudi Basuki, ST,MT selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan pengertian dengan segala kondisi serta keterbatasan penulis sejak awal hingga saat ini.
3. .... sebagai dosen penguji
4. Yang tercinta Edy suamiku, anak-anakku Nana, Novi serta semua pihak yang ikut membantu hingga selesainya tulisan ini.

Saya menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu masukkan dari berbagai pihak senantiasa saya harapkan sehingga tulisan ini lebih bermanfaat.

Semarang, Juli 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan dan Sasaran .....	5
1.4. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.5. Kerangka Pemikiran .....	
1.6. Metode Penelitian .....	
1.6.1. Pendekatan Studi .....	
1.6.2. Tahap Penelitian .....	
1.6.3. Teknik Analisa .....	

**BAB II TINJAUAN UMUM KECAMATAN BANDONGAN**

- 1.1. Letak dan luas .....
- 1.2. Geografi .....
- 1.3. Penggunaan Lahan .....
- 1.4. Penduduk .....

**BAB III KARAKTERISTIK PENDUDUK DAN FASILITAS  
PENDIDIKAN**

- 1.1. Karakteristik penduduk .....
- 1.1.1. Jumlah dan kepadatan penduduk .....
- 1.1.2. Mata pencaharian penduduk .....
- 1.1.3. Tingkat pendidikan penduduk .....
- 1.2. Konsep Fasilitas Pendidikan .....
- 1.2.1. Pengertian Fasilitas Pendidikan .....
- 1.2.2. Kondisi eksisting SMA Bandongan .....
- 1.2.3. Tingkat pelayanan sekolah .....
- 1.3. Konsep Jangkauan pelayanan .....
- 1.3.1. Pengertian jangkauan pelayanan .....
- 1.3.2. Penyebaran sekolah .....

**BAB IV ANALISA JANGKAUAN PELAYANAN SMA NEGERI  
BANDONGAN SEBAGAI FASILITAS PENDIDIKAN**

<b>DI KABUPATEN MAGELANG .....</b>	
1. Perkembangan APK, APM dan TPS dari tahun 2002-2006 .....	
2. Perhitungan jangkauan pelayanan pendidikan .....	
3. Analisis jangkauan pelayanan pendidikan untuk memperoleh kebutuhan sekolah .....	
4. Pemilihan lokasi sekolah dengan memperhatikan RTRW kawasan pendidikan .....	
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	
5.1. Kesimpulan .....	
5.2. Saran .....	
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL II.1</b> : Rangkuman Sintesa Teori .....	22
<b>TABEL III.1</b> : Klasifikasi Desa-desa Kecamatan Bandongan .....	29
<b>TABEL III.2</b> : Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup> dirinci per desa di Kecamatan Bandongan .....	30
<b>TABEL III.3</b> : Penduduk Kecamatan berumur 10 tahun keatas Menurut Mata Pencaharian .....	31
<b>TABEL III.4</b> : PDRB tahun 2004-2006 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kecamatan Bandongan .....	33
<b>TABEL III.5</b> : Fasilitas Pendidikan Kecamatan Bandongan Tahun 2004-2006 .....	34
<b>TABEL III.6</b> : Luas Wilayah, Penduduk Seluruhnya dan Penduduk Usia Sekolah Kecamatan Bandongan Tahun 2005/2006 .....	34
<b>TABEL III.7</b> : Jumlah Siswa, Jumlah Rombongan Belajar, Jumlah Lulusan Sekolah Menengah Pertama Kecamatan Bandongan tahun 2005/2006 .....	35
<b>TABEL III.8</b> : Jumlah Rombongan Belajar, Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Kecamatan Bandongan Tahun 2005/2006 .....	36
<b>TABEL III.9</b> : Jumlah Siswa, Jumlah Usia Sekolah SMA Kecamatan Bandongan Tahun 2005/2006 .....	36

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR 1.1</b>	: Kerangka Pemikiran Studi .....	8
<b>GAMBAR 2.1</b>	: Sifat Alami Tempat .....	14
<b>GAMBAR 2.2</b>	: Jenis Pola Penyebaran .....	17
<b>GAMBAR 3.1</b>	: Peta Administrasi Kabupaten Magelang .....	27
<b>GAMBAR 3.2</b>	: Peta Sebaran Sekolah Kecamatan Bandongan ...	38
<b>GAMBAR 4.1</b>	: Tingkat Pelayanan Sekolah .....	46
<b>GAMBAR 4.2</b>	: Jangkauan Pelayanan .....	48

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan pendidikan nasional tidak dapat lepas dari perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun global. Pendidikan harus dibangun dalam keterkaitannya secara fungsional dengan berbagai bidang kehidupan, yang masing-masing memiliki persoalan dan tantangan semakin kompleks. ( Renstra Depdiknas 2005-2009 )

Pemberlakuan otonomi termasuk dalam bidang pendidikan ini dimaksudkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah kabupaten/kota sehingga daerah dapat mengambil prakarsa dan merumuskan perencanaan pendidikan secara partisipatif, koordinatif dengan memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki. ( UU No 32 tahun 2004 dan PP No 25 tahun 2000 )

Melalui pemberian kewenangan yang luas ini diharapkan dapat disusun program dan kegiatan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam proses pengambilan keputusan maupun, pemberian dukungan dan pengawasan sehingga program pendidikan dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal,

nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesimbangan.( UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003)

Untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi semua penduduk, melalui pendidikan formal SMA atau bentuk pendidikan lain yang sederajat, program pendidikan menengah pertama didorong untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak positif Wajar Dikdas 9 tahun.

Target APK SMA/SMK/MA/MAK sebesar 52,2 % (tahun 2005 ) akan ditingkatkan menjadi 62,5% pada tahun 2009 termasuk peningkatan APK. Sedangkan untuk Kabupaten Magelang APK 30,48 % dan APM sebesar 22,18 %.( Tahun 2005 ). Dilihat dari angka tersebut APK ( Angka Partisipasi Kasar ) dan APM ( Angka Partisipasi Murni ) yang ada di Kabupaten Magelang masih jauh di bawah target yang ada. ( Profil Pendidikan Kabupaten Magelang tahun 2005 )

Untuk menurunkan angka putus sekolah terutama di daerah pedesaan maka fasilitas pendidikan program perluasan dan akses pendidikan perlu adanya suatu pengembangan model layanan alternatif pendidikan untuk menampung lulusan SMP di daerah tersebut.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan data pendidikan penduduk ( Profil Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2005 ), dapat diketahui bahwa kualitas penduduk dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan dalam hal pendidikan. Tetapi perkembangan penduduk menurut tingkatan pendidikan di Kabupaten Magelang termasuk yang rendah. Sebagian besar masih tamat SD yaitu sebesar 36,69 % dan yang tidak/belum tamat SD sebanyak 29,40 % serta masih banyaknya lulusan Sekolah Menengah yang menganggur, putus sekolah dan droup out. ( Profil Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2005 )

Lulusan SLTP di Kecamatan Bandongan sebagian ada yang melanjutkan ke SMA di wilayah lain, hal ini disebabkan karena penyebaran sekolah menengah atas belum merata. Sehingga mengakibatkan APM dan APK di Kabupaten Magelang rendah. Kondisi demikian ini sangatlah berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan perkembangan perekonomian di daerah dan menyebabkan masyarakat jatuh miskin karena banyaknya pengangguran dan perekonomian rendah. Kondisi sekolah menengah yang ada di Kabupaten Magelang khususnya wilayah Kecamatan Bandongan belum bisa menampung lulusan SLTP ke jenjang yang lebih tinggi secara optimal.

Permasalahan yang timbul di wilayah Kabupaten Magelang menyangkut fasilitas pendidikan yang berkaitan dengan tingkat pelayanan sekolah yang belum bisa merata, sehingga menimbulkan banyaknya anak lulusan SMP kabupaten yang tidak tertampung atau tidak dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya, anak putus sekolah terutama di daerah–daerah tertinggal, setelah lulus SMP mereka bekerja

sebagai buruh di pabrik atau dinikahkan, dll. Hal tersebut dapat dilihat terutama di daerah / desa . ( Profil Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2005 )

Berdasarkan permasalahan akan dilakukan penelitian dengan tujuan mengkaji kebutuhan dan jangkauan pelayanan pendidikan SMA Bandongan sebagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Magelang. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan ( *research questions* ? ) : “ Bagaimana jangkauan pelayanan SMA Negeri Bandongan sebagai fasilitas pendidikan menengah di pedesaan ?”

### **1.3 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kebutuhan dan jangkauan pelayanan SMA Bandongan sebagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Magelang .

Sasaran penelitian dari kebutuhan dan jangkauan pelayanan SMA Bandongan sebagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Magelang adalah :

- a. Identifikasi Kondisi wilayah meliputi Kondisi fisik dan sosial ekonomi
- b. Identifikasi Kondisi pendidikan
- c. Analisis daya tampung sekolah di Kecamatan Bandongan
- d. Analisis Jangkauan pelayanan SMA Bandongan dan pola persebaran
- e. Analisis kebutuhan sekolah
- f. Kesimpulan dan rekomendasi

### **1.4 Ruang Lingkup**

#### **1.4.1. Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi yang dikaji dalam penelitian ini adalah kebutuhan dan jangkauan pelayanan SMA Bandongan sebagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Magelang yang meliputi :

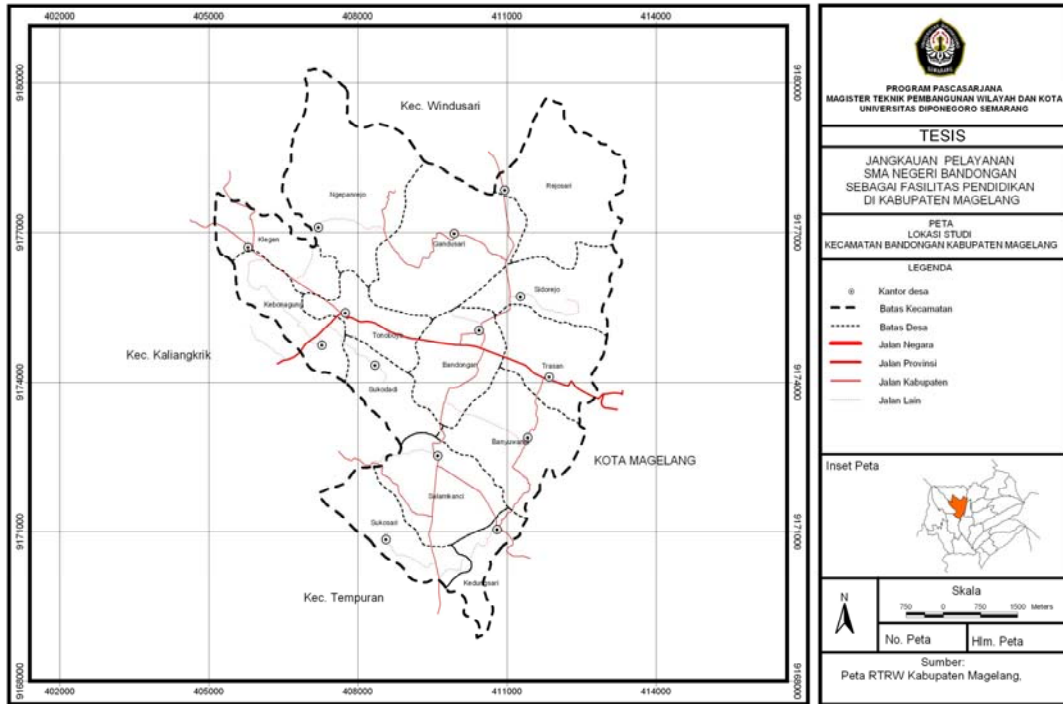
- a. Identifikasi kondisi wilayah meliputi kondisi fisik ( letak geografis, topografi, klasifikasi desa ) dan sosial ekonomi ( mata pencaharian, PDRB, fasilitas pendidikan, sebaran sekolah, kependudukan ) Kecamatan Bandongan.
- b. Identifikasi kondisi pendidikan di Kecamatan Bandongan meliputi jumlah sekolah, ruang belajar, jumlah siswa, tingkat pelayanan sekolah.
- c. Analisis Daya Tampung sekolah dihitung berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Melanjutkan dan Rasio siswa per kelas.
- d. Analisis Jangkauan pelayanan SMA Bandongan dan pola persebaran meliputi jarak / radius sekolah dari asal SLTP menuju ke sekolah.
- e. Analisis kebutuhan sekolah berdasarkan daya tampung dan jangkauan pelayanan.

#### **1.4.2. Ruang Lingkup Wilayah**

Wilayah penelitian ini adalah Kecamatan Bandongan yang terletak disalah satu kecamatan di Kabupaten Magelang, luas wilayahnya 108.573 ha dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Windusari
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tempuran
- Sebelah Timur : Kecamatan Kaliangkrik
- Sebelah Barat : Kotamadia Magelang

Peta wilayah studi dapat dilihat pada gambar 1.1. sebagai berikut :



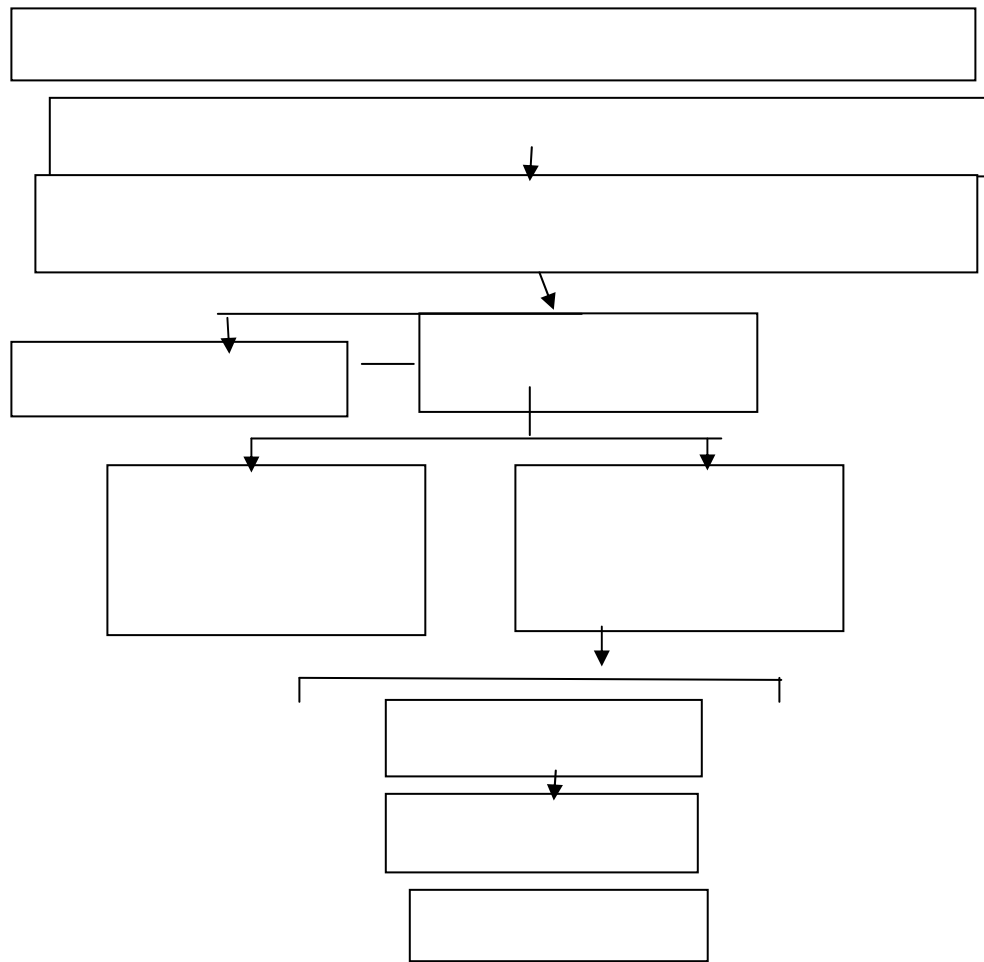
### **1.5. Kerangka Pikir**

Secara garis besar konsep pemikiran dalam penyusunan kebutuhan dan jangkauan pelayanan SMA Negeri Bandongan sebagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Magelang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia
- Kondisi nyata sebaran SMA yang ada di wilayah Kecamatan Bandongan
- Fasilitas pendidikan SMA yang ada di Kecamatan Bandongan dapat menggambarkan jangkauan pelayanan pendidikan bagi kondisi dan situasi masyarakat Kecamatan Bandongan.
- Kondisi wilayah ketersediaan sarana prasarana perhubungan baik transportasi dan komunikasi untuk memperlancar arus barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain, meningkatkan mobilitas manusia ke tempat tujuan, ataupun membantu siswa dari tempat tinggal menuju ke lokasi sekolah.
- Keadaan Sosial ekonomi masyarakat akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan pendidikan. Dalam hal ini termasuk pendapatan, mata pencaharian, tingkat pendidikan masyarakat.
- Kondisi eksisting SMA Negeri Bandongan sebagai fasilitas pendidikan
- Analisis daya tampung sekolah dan jangkauan pelayanan sekolah serta pola persebaran di Kecamatan Bandongan dapat dipakai untuk mengetahui jumlah

kebutuhan sekolah di kecamatan tersebut dan pemilihan lokasi yang tepat untuk penempatan USB.

Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada diagram alir yang disajikan pada Gambar 1.2 sebagai berikut :



GAMBAR 1.2.  
KERANGKA PEMIKIRAN STUDI  
**Kebutuhan dan Jangkauan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan  
Bandongan Kabupaten Magelang**

## **1.6. Metode Penelitian**

Dalam upaya mencapai tujuan studi yang digunakan metode kuantitatif menurut Mitchell J. Rycus, 1988 untuk mempelajari *trend* ( kecenderungan ) jangka panjang, meramalkan efek jangkauan kebijakan pada masyarakat, dan memperkirakan masalah-masalah yang potensial, semua ini melengkapi pilihan kebijakan yang rasional bagi para pengambil keputusan.

### **1.6.1. Pendekatan Studi**

Dalam pembuatan dan pembahasan studi ini pendekatan yang digunakan adalah dengan melakukan analisis terhadap pertumbuhan penduduk, partisipasi dalam pendidikan yakni menghitung prosentase penduduk yang bersekolah dengan arus murid dari satu tingkat ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi yaitu dari SMP ke SMA di Kecamatan Bandongan untuk menganalisis jangkauan pelayanan SMA Negeri Bandongan sebagai fasilitas pendidikan di Kecamatan Bandongan. Sehingga dapat digunakan sebagai informasi atau dasar pemilihan alternatif pada pengambilan keputusan guna perencanaan selanjutnya.

### **1.6.2. Tahap Penelitian**

Penelitian tentang Jangkauan pelayanan pendidikan SMA dilaksanakan dalam tiga tahap :

#### **a. Persiapan**

Pekerjaan yang dilakukan pada tahap persiapan adalah menyiapkan instrumen penelitian yaitu :

- 1) Data Sekunder
- 2) Peta

#### **b. Pelaksanaan**

Pekerjaan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan yaitu :

- 1). Mengidentifikasi kebutuhan data :
  - Peta lokasi sekolah ( SMP dan SMA) Kecamatan Bandongan
  - Profil Pendidikan Kecamatan Bandongan ( fasilitas pendidikan, penduduk usia sekolah, jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah rombongan belajar )
  - Jangkauan / radius sekolah yang harus ditempuh ( Jangkauan pelayanan meliputi desa-desa dengan batas Kecamatan Bandongan )
- 2). Menentukan cara perolehan data :
  - Pengumpulan data sekunder

#### **c. Analisis**

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1). Identifikasi kondisi wilayah meliputi kondisi fisik dan sosial ekonomi Kecamatan Bandongan

Analisis data meliputi :

- Luas wilayah
- Jumlah desa

- Jumlah dusun
- Jumlah RT dan RW
- Klasifikasi desa
- Jumlah penduduk
- Kepadatan penduduk
- Mata pencaharian penduduk
- PDRB
- Sarana transportasi
- Sarana komunikasi

2). Identifikasi Fasilitas Pendidikan

3). Analisis Daya Tampung Sekolah dihitung berdasarkan APK, APM, Angka Melanjutkan dan Rasio siswa per kelas, Tingkat Pelayanan Sekolah sebagai berikut :

- Angka Partisipasi Kasar ( APK ) SMA

Cara Analisis :

$$APK = \frac{\text{Jumlah siswa seluruhnya}}{\text{Jumlah penduduk 16 – 18 tahun}} \times 100$$

Dengan menghitung APK SMA Kecamatan Bandongan lima tahun terakhir dari tahun 2002-2006 untuk melihat besarnya prosentase APK yang ada di kecamatan tersebut.

- Angka Partisipasi Murni ( APM ) SMA

Cara Analisis :

$$APM = \frac{\text{Jumlah siswa tingkat SMA usia 16-18 th}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun}} \times 100$$

Dengan menghitung APM SMA Kecamatan Bandongan lima tahun terakhir dari tahun 2002-2006 untuk melihat besarnya prosentase APM yang ada di kecamatan tersebut.

- Tingkat Pelayanan Sekolah ( TPS )

Cara analisis :

$$TPSn = \frac{\text{Jumlah Lulusan SLTP}}{\text{Jumlah Lembaga SM ekuivalen}}$$

$$n = \text{SMA}$$

Dengan menggunakan rumus penghitungan di atas untuk mengukur tingkat pelayanan sekolah akan membantu untuk menganalisa prosentase tingkat pelayanan sekolah.

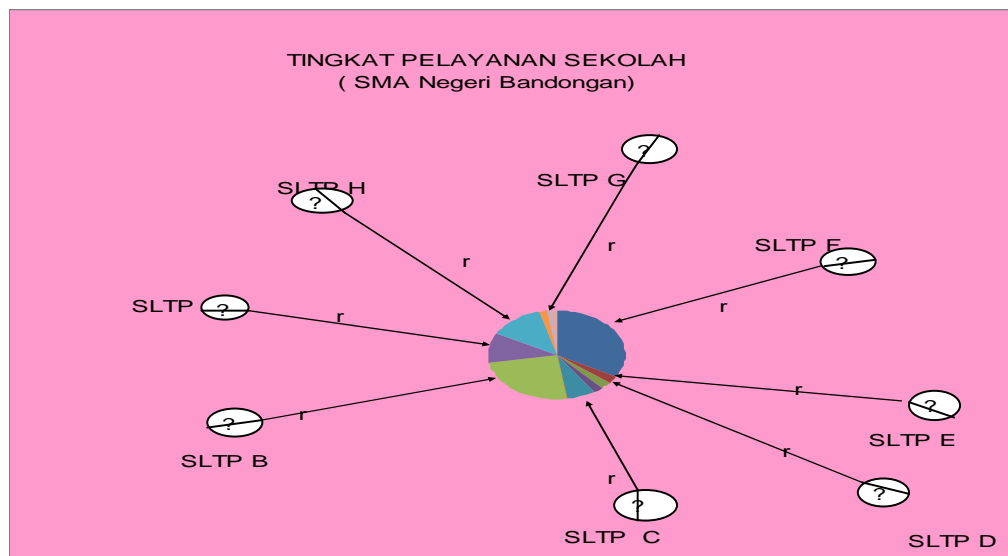
- Menghitung Rasio Siswa per kelas (rombongan belajar)
- Menghitung Angka Melanjutkan

Cara analisis :

Menghitung jumlah lulusan tingkat SLTP yang melanjutkan ke SMA

Berapa persen yang dapat tertampung di SMA Negeri, dan prosentase terbesar dari SLTP mana, kemudian yang tidak tertampung kemana saja ( ke SMA lain, bekerja, tidak melanjutkan, dinikahkan, dll )

Tingkat Pelayanan sekolah SMA Negeri Bandongan dari asal lulusan SLTP dapat dilihat dari Gambar 1.3 berikut :



*Sumber : Hasil Penelitian, 2008*

Keterangan : r jarak tempuh  
? angka yang dicari

**GAMBAR 1.3.**

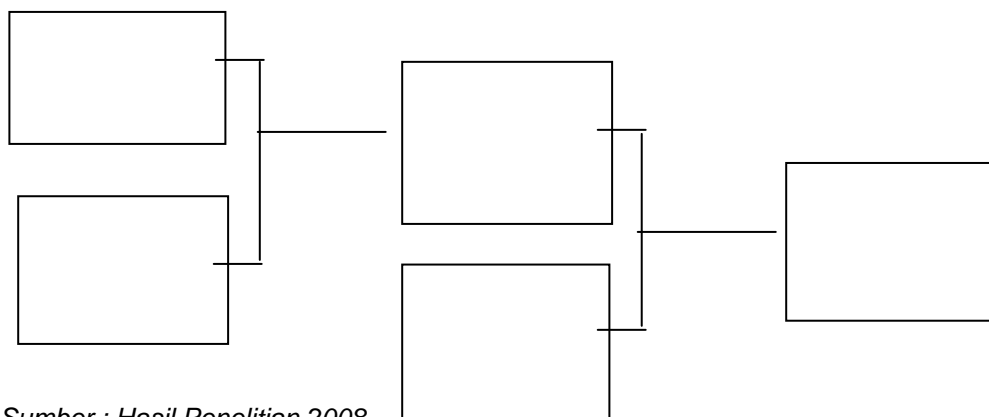
**TINGKAT PELAYANAN SEKOLAH**

Dari gambar di atas dapat dijelaskan tentang TPS SMA Bandongan yaitu jumlah lulusan SLTP di Kecamatan bandongan yang dapat dilayani oleh SMA di wilayah tersebut. Dari lulusan SLTP yang ada bisa kita lihat bahwa tidak semua lulusan SLTP bisa tertampung di SMA Negeri Bandongan. Dalam hal ini yang akan kami kaji adalah berapa persen lulusan SLTP A, B, C, D, E F, G yang melanjutkan ke SMA Negeri Bandongan dikaitkan dengan jarak tempuh siswa dari asal SLTP.

### 1.6.3. Teknik Analisa

Teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisis *overlay* (penampalan peta) yang dilakukan dengan cara mengoverlaykan data peta untuk dapat mengetahui kondisi jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan Kecamatan Bandongan berdasarkan data dan informasi yang ada.

Untuk penelitian ini prosedur yang diperlukan dapat dilihat Diagram Overlay Peta pada gambar 1.4. sebagai berikut :



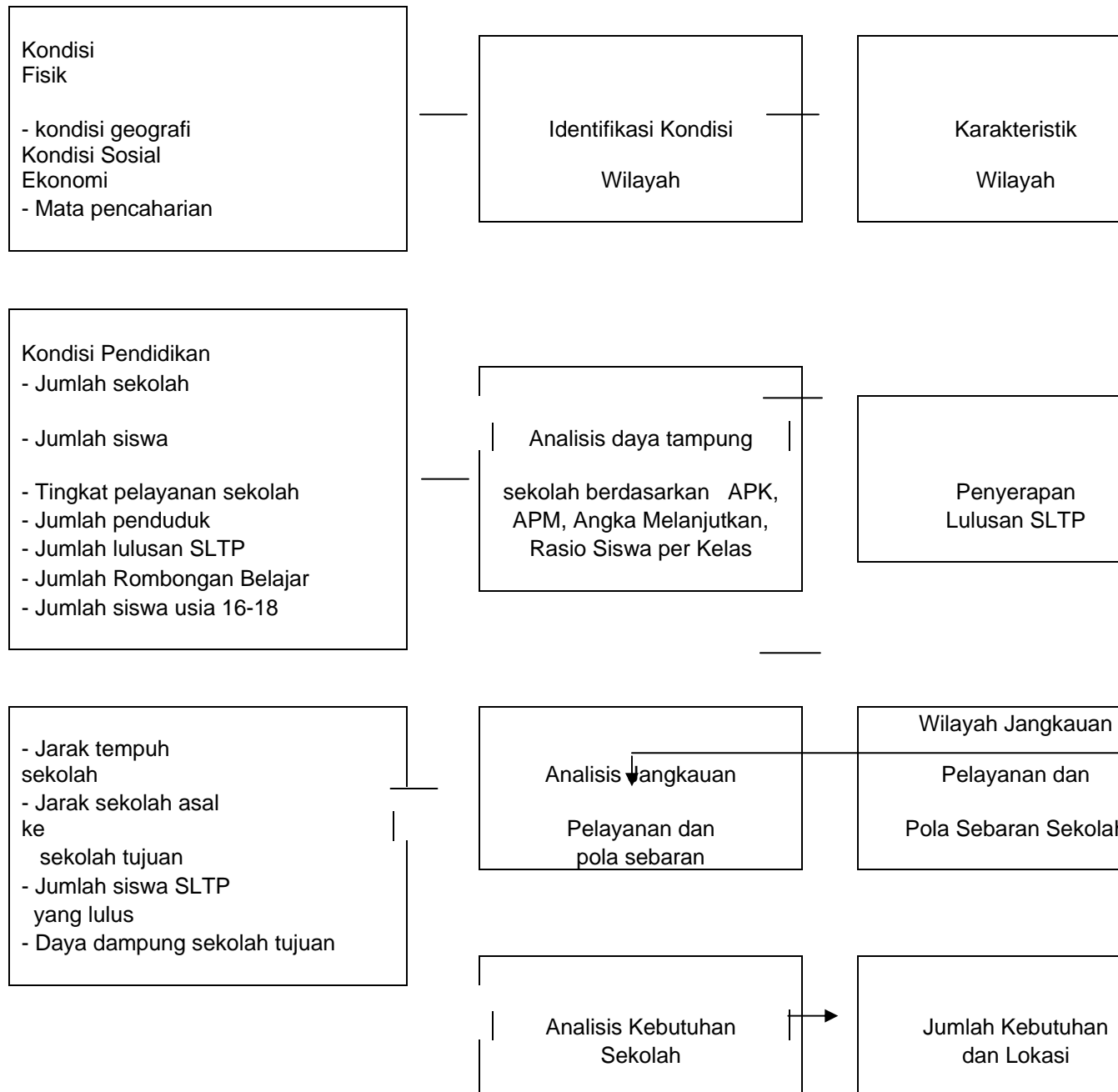
Sumber : Hasil Penelitian,2008

**GAMBAR 1.4**  
**DIAGRAM KERJA OVERLAY PETA**

- Analisis kebutuhan Sekolah di Kecamatan Bandongan dapat dilihat dari besarnya daya tampung siswa dihitung dari prosentasi APK, APM, TPS, jumlah lulusan tingkat SLTP yang melanjutkan ke SMA, Rasio Siswa per kelas ( rombongan belajar ) dan menghitung jarak tempuh / radius sekolah dengan tempat tinggal siswa serta melihat pola sebaran sekolah. Hasil penghitungan tersebut akan membantu untuk menghitung kebutuhan SMA di Kecamatan Bandongan.

#### **1.6.4. Kerangka Analisis**

Kerangka analisis Kebutuhan dan Jangkauan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dapat dilihat pada gambar 1.5. sebagai berikut :



Sumber : Hasil Penelitian, 2008

**Gambar 1.5.**  
**KERANGKA ANALISIS**

## **BAB II**

### **JANGKAUAN PELAYANAN DAN FASILITAS PENDIDIKAN**

#### **2.1. Teori Lokasi dalam Penentuan Fasilitas**

Petter E.Lloyd dalam bukunya *Location in Space* (1977) melihat bahwa jangkauan / luas pasar dari setiap komoditas ada batasnya yang dinamakan *range* dan batas minimal dari luas pasarnya agar produsen bisa tetap bertahan hidup (berproduksi). (Robinson, 2005 : 79)

Suatu kawasan / wilayah / tempat dan faktor yang ada di sekitarnya berkaitan dengan lokasi sekolah dapat mempengaruhi perkembangan sosial masyarakat. Bentuk kawasan pedesaan merupakan pencerminan dari suatu struktur sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di masa depan. Lokasi pendidikan dapat dianalohkan dengan konsep teori tempat sentral ( *central place theory* ) menurut Christaller dalam Sitohang (1990: 132 ) , yaitu :

1. Terdapat suatu hirarki dari komponen-komponen jasa, berlingkup mulai dari pelayanan pada tingkat rendah yang terdapat pada setiap pusat-pusat kota atau kampung sampai pelayanan pada tingkat tinggi yang hanya terdapat di pusat-pusat yang besar.

Kota-kota besar cenderung untuk memiliki hampir segala macam kegiatan jasa, sedangkan kota-kota kecil dan kampung hanya memiliki jumlah yang terbatas. Masing-masing kegiatan jasa mempunyai penduduk ambang dan lingkup pasar.

Penduduk ambang (*Threshold population*) adalah jumlah minimum penduduk yang harus ada untuk dapat menopang kegiatan jasa.

2. Lingkup pasar (*market range*) dari suatu kegiatan jasa adalah jarak yang ditempuh oleh penduduk untuk mencapai tempat penjualan jasa tersebut, dengan catatan bahwa penempuhan jarak itu adalah berdasarkan kesediaan orang yang bersangkutan. Lingkup ini adalah batas terluar dari daerah pasar bagi suatu kegiatan jasa, diluar batas mana orang akan mencari pusat lain.

Lingkup pasar dapat merupakan suatu fungsi sederhana dari jarak linier tetapi lebih besar kemungkinan dipengaruhi oleh faktor konstan, karena lingkup dapat berbeda-beda. Menurut faktor-faktor seperti besar dan pentingnya pusat yang bersangkutan dan tingkat pendapatan penduduk di daerah belakang.

Lokasi sekolah dalam ruang perkotaan dapat dipelajari dengan menggunakan teori lokasi. Teori ini, dipelopori oleh Von Thunen yang menyimpulkan bahwa karena keawetan produk yang dihasilkan dan biaya transportasi, maka daerah yang berdekatan dengan pasar akan cocok untuk tanaman yang lekas rusak, makin jauh dari pasar, maka biaya angkutan akan makin dipertimbangkan (Djojodipuro, 1992 : 4).

*The first attempt to explain spatial patterns stems from Von Thunen (Isolated State, 1826). He imagines a large town, surrounded by a large plain uniform fertility. The town supplies its rural hinterland with manufactured goods and services and provides a market for agricultural surplus product*

*in the rural area. Transportation cost are crucial. Heavy and bulky goods are consequently produced in the vicinity of the town. Lighter, less bulky goods can incur relatively higher transportation cost and will therefore be produced in more remote places. Thus a system of concentric circles emerges.*

*In principle Von Thunen's isolated state has only one large town, at least in its original version. There is only one mode of transport which has no economies of scale. Furthermore, his main concern is not the town, but the organization of the surrounding space. He obviously does not believe in a centre hierarchy, for, in his view, smaller centres are seldom efficient. In a later published addition, he grudgingly admits the existence of "provincial" towns of unequal size. ("advantages of association") and the disadvantages of higher transportation costs. (United Nations, 1979: 52)*

Dalam perkembangannya, teori ini lebih dikenal dengan teori guna lahan. Hal penting yang memegang peranan dalam penentuan lokasi adalah jarak. Yang bisa digunakan sebagai penentuan fasilitas umum diantaranya fasilitas pendidikan.

Lokasi sekolah juga dapat dianalogkan dengan lokasi industri maka setidaknya mengetahui tentang struktur ruang. Menurut Glasson dalam Sitohang, 1990 : 132 bahwa setidaknya terdapat 3 unsur pokok dalam struktur ruang yaitu :

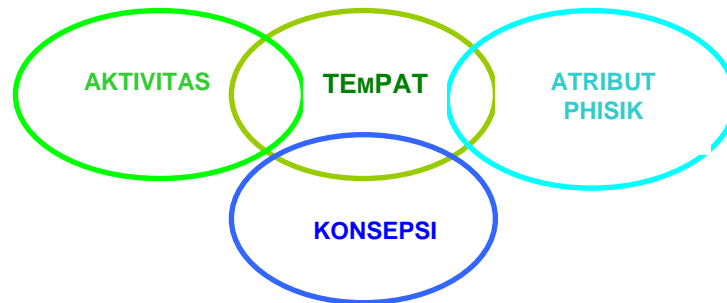
2. Kelompok lokasi industri jasa atau tersier, termasuk pelayanan administrasi keuangan, perdagangan eceran dan besar, dan pelayanan jasa-jasa lainnya, yang cenderung mengelompok menjadi sistem tempat sentral yang tersebar secara

seragam pada hamparan daerah yang mempunyai hubungan yang mudah dengan pasar-pasar terbesar;

3. Lokasi-lokasi yang memencar dengan spesialisasi industri seperti *manufacturing*, pertambangan dan rekreasi yang cenderung untuk mengelompok menjadi “*cluster*” atau aglomerasi menurut lokalisasi sumber daya fisik seperti batubara, dan sifat-sifat fisik seperti lembah sungai dan pantai;
4. Pola jaringan pengangkutan, umpamanya jalan raya dan kereta api, yang dapat menimbulkan pola pemukiman yang linear.

Letak suatu sekolah, diharapkan dalam suatu lokasi yang baik atau optimal. Menurut Daldjoeni (1992 : 61), lokasi optimal adalah lokasi yang terbaik secara ekonomis. Model yang sederhana dari teori lokasi adalah memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara meminimkan biaya transportasi. Para ahli ekonomi mempunyai kecocokan dengan model biaya transportasi, produk yang mempunyai biaya pengiriman tinggi, cenderung sensitif terhadap biaya transportasi (Blair, 1995 : 43). Menurut John P. Blair dan Robert Premus, dalam perkembangannya, variasi mengenai ruang di dalam ukuran pasar, perbedaan biaya produksi, kenyamanan wilayah, kemajuan teknologi dan faktor lain, terintegrasi ke dalam model yang kompleks dalam proses pengambilan keputusan mengenai lokasi (Bingham dan Miered., 1993 : 3).

Guna mengidentifikasi suatu tempat atau lokasi, perlu diketahui unsur utama apa yang membentuk tempat tersebut. Canter (1977 : 158), menggambarkan unsur tersebut pada gambar 2.1 sebagai berikut :



(Sumber : *The Psychology of Place*, 1977 : 158)

### **GAMBAR 2.1 SIFAT ALAMI TEMPAT**

Indikasi adanya suatu tempat adalah hasil hubungan antara (a) aktivitas, (b) atribut fisik, dan (c) konsepsi. Artinya, suatu tempat belum secara penuh dikenali, sebelum mengetahui perilaku yang dihubungkan dengan tempat tersebut, parameter mengenai pengaturan fisik dan konsepsi orang mengenai perilaku dalam lingkungan fisik tersebut (Canter, 1977 : 159).

Dari berbagai teori tersebut diatas yang sesuai dengan kondisi Kecamatan Bandongan adalah teori tempat sentral (*central place theory*), dalam kegiatan sehari-hari kecamatan Bandongan cenderung untuk memiliki hampir segala macam kegiatan jasa berpusat di Kecamatan Bandongan yang merupakan sentral kegiatan baik perekonomian, pelayanan kesehatan, pelayanan umum dan pelayanan pendidikan di wilayah tersebut. Termasuk kawasan / tempat pendidikan SMA juga berada di Kecamatan Bandongan.

## **2.2. APK, APM dan TPS**

Angka Partisipasi Kasar ( APK ) adalah perbandingan antara jumlah siswa seluruhnya ( di jenjang pendidikan tertentu ) dengan jumlah penduduk usia sekolah. ( Husaini , 2006 : 102 )

Angka Partisipasi Murni ( APM ) adalah perbandingan antara jumlah siswa usia sekolah ( di jenjang pendidikan tertentu ) dengan jumlah penduduk usia sekolah. ( Husaini , 2006 : 102 )

Tingkat Pelayanan Sekolah ( TPS ) adalah jumlah lulusan SLTP dan MTs yang dapat dilayani oleh SMA yaitu perbandingan antara jumlah lulusan tingkat SLTP dengan jumlah lembaga sekolah menengah. ( Husaini , 2006 : 102 )

APK dan APM yang dimaksud disini adalah untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan jumlah penduduk usia sekolah yang dimaksud adalah usia 16 – 18 tahun. APK, APM dan TPS merupakan indikator untuk melakukan diagnosa dalam penentuan jangkauan pelayanan pendidikan.

Dan juga untuk mengkaji jumlah kebutuhan sekolah yang didasarkan atas keperluan masyarakat pada saat ini, dengan menitikberatkan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan.

## **2.3. Jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan**

Jangkauan atau radius sekolah yang harus ditempuh oleh penduduk menuju lokasi sekolah secara nasional jarak capai yang diperhitungkan ialah jarak perjalanan

kaki dalam keadaan normal. Untuk sekolah lanjutan jarak 5 km yaitu 1 jam jalan kaki .( Indrafachrudi, dkk (1989: 142)

Terkait dengan pelayanan dalam kota, Weber Walter Christaller (1933) dan August Lösch (1936), secara terpisah mengembangkan teori tempat pusat (*central place theory*). Konsep utama dalam teori ini adalah apa yang dinamakan dengan *the range of good* dan *the threshold value* (United Nation, 1979 : 53). *Range of good service* merupakan jarak yang ditempuh para konsumen menuju suatu tempat untuk mendapatkan pelayanan, adapun *threshold value* atau *threshold population* merupakan jumlah penduduk minimal yang dibutuhkan suatu unit pelayanan sebelum dapat beroperasi secara menguntungkan (Daldjoeni : 1992 : 104).

Apabila dikaitkan dengan fasilitas pendidikan maka luas jangkauan pelayanan pendidikan minimal sangat tergantung pada tingkat kepadatan penduduk pada wilayah. Makin tinggi kepadatan penduduk makin kecil wilayah jangkauan pelayanan pendidikan begitu juga sebaliknya.

Menurut Teori tempat central jenis pelayanan jasa dapat dikelompokkan kepada :

- a. pelayanan perbaikan (*repair work*) dan pekerjaan lain dari yang sejenis
- b. distribusi dan pengangkutan barang-barang
- c. pelayanan akan administrasi, pendidikan dan informasi
- d. pelayanan keamanan dan kesehatan

Luas pemasaran dari kegiatan pelayanan itu ialah sejauh mana seseorang bersedia untuk berjalan mencapai itu. Apabila jarak ini dilampui maka seseorang akan akan mencari pelayanan lain yang lebih dekat. (Sinulingga, 2005 : 27 )

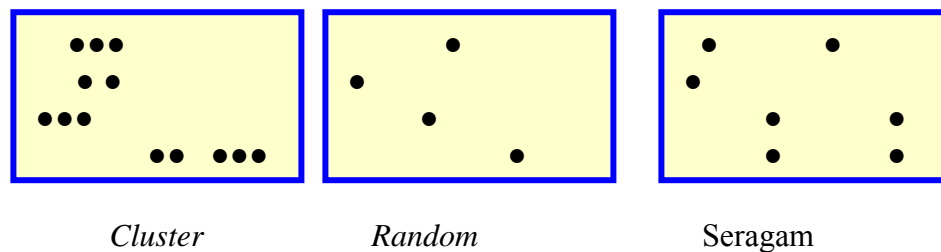
Perihal jangkauan / radius sekolah yang harus ditempuh oleh penduduk menuju lokasi sekolah, berbagai literatur berbeda-beda seperti :

- 1) Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2006 tentang standar sarana dan prasarana SMA/MA yaitu satu SMA/MA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA/MA baru.
- 2) Indrafachudi, dkk (1989: 142) secara nasional jarak capai yang diperhitungkan ialah jarak perjalanan kaki dalam keadaan normal. Untuk sekolah lanjutan diambil jarak 5 km yaitu 1 jam jalan kaki.
- 3) Badan Standar Nasional Indonesia tentang saran dan prasarana yaitu satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMA/MA dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

Dalam penelitian ini untuk mengukur radius / jarak menuju lokasi sekolah dan pelayanan pendidikan menggunakan menggunakan Badan Standar Nasional Indonesia dengan jarak radius maksimum 6 km dan melayani maksimum 6000 jiwa.

Letak atau penyebaran sekolah dalam konteks ruang perkotaan dapat didekati dengan melakukan analisis keruangan. Menurut Bintarto, 1982, pada hakekatnya analisis keruangan adalah analisis lokasi yang menitikberatkan kepada 3 unsur geografi yaitu jarak (*distance*), kaitan (*interaction*) dan gerakan (*movement*). Salah satu model dalam analisis keruangan adalah analisis tetangga terdekat (*nearest-*

*neighbour analysis*) yang menggambarkan pola penyebaran pemukiman dalam 3 bentuk yaitu : (i) *type cluster* atau mengelompok, (ii) *type random*, dan (iii) *type regular* atau seragam ( Haggett, 1968 : 89). Pola penyebaran tersebut dapat digambarkan pada gambar 2.2 sebagai berikut :



Sumber : Peter Hagget, 1968

**GAMBAR 2.2**  
**JENIS POLA PENYEBARAN**

Analisis tetangga terdekat dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut (Bintarto, 1982 : 75-76) : (i) menentukan batas wilayah yang akan diselidiki, (ii) mengubah pola penyebaran pemukiman menjadi pola titik, (iii) memberikan nomor urut bagi tiap-tiap titik untuk mempermudah analisis, (iv) mengukur jarak terdekat yaitu jarak pada garis lurus antara satu titik dengan titik lain yang merupakan tetangga terdekat, dan (v) menghitung besar parameter tetangga terdekat (*nearest-neighbour statistic*) dengan formula :

$$T = \frac{J_u}{J_h}$$



### **2.4.1. Kebijakan Bidang Pendidikan**

Kebijakan pendidikan (*educational policy*) menurut Carter V Good (1959) sebagai suatu pertimbangan (*judgement*) yang didasarkan atas sistem nilai (*values*) dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat lembaga, artinya pendidikan diselenggarakan secara formal pada satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman dan arah untuk mengambil keputusan agar tujuan yang bersifat lembaga dapat dicapai secara optimal (Imron, 1996:18).

### **2.4.2. Nasional**

Dasar Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional adalah :

#### **A. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan nasional, tercantum bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Visi Departemen Pendidikan Nasional**

Visi Departemen Pendidikan Nasional sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut : “ Terwujudnya system pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan

berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkulaitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”.

### C. Misi Departemen Pendidikan Nasional

Misi Pendidikan Nasional adalah :

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pendidikan Nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga negara Indonesia menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional.

### **2.4.3. Standar Pelayanan Minimal**

Standar lain selain dari standar Nasional Pendidikan , Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, Pendidikan Nonformal,UKS, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah. Tujuan standar pelayanan minimal (SPM) merupakan acuan dasar dan normatif yang memuat kriteria dan persyaratan minimal penyelenggaraan pendidikan, dengan tujuan sebagai berikut :

- a. menetapkan standar kualitas pelayanan minimal lembaga penyelenggara pendidikan secara nasional yang merupakan bagian integral dari standar nasional pelayanan pendidikan;
- b. memberikan acuan kepada daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pendidikan;

Menyediakan tolok ukur penilaian kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan, baik yang dilakukan eksternal oleh lembaga akreditasi yang berwenang maupun secara internal sebagai evaluasi diri oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

### **2.4.4. Penentuan Variabel Penelitian**

Penentuan variabel penelitian dapat dilihat pada tabel II.1 sebagai berikut :

**TABEL II.1**  
**PENENTUAN VARIABEL PENELITIAN**

No	Substansi	Sumber	Variabel	Sasaran
1.	<p>Jangkauan dari setiap komoditas ada batasnya yang dinamakan range dan batas minimal dari luas pasar.</p> <p>Kota cenderung memiliki hampir segala macam kegiatan jasa, dan market range dari □sura kegiatan jasa adalah jarak yang ditempuh</p> <p>Makin jauh dari pasar, maka biaya angkutan akan makin dipertimbangkan</p> <p>Kota kecil biaya transportasi akan lebih besar dan kurang menguntungkan</p> <p>Unsur struktur ruang yaitu : lokasi jasa, lokasi industri dan pola jaringan pengangkutan.</p> <p>Lokasi optimal adalah lokasi terbaik secara ekonomis dengan cara meminimkan biaya transportasi</p> <p>Ruang di dalam ukuran pasar terintegrasi ke dalam model yang kompleks dalam proses pengambilan keputusan mengenai lokasi</p> <p>Indikasi suatu tempat adalah hasil hubungan antara aktivitas, atribut fisik dan konsepsi.</p>	<p>Robinson Tarigan, 2005 : 79</p> <p>Christaller dalam Sitohang , 1990 : 132</p> <p>Djojodipuro, 1992 : 4</p> <p>United Nations, 1979 : 52</p> <p>Glasson dalam Sitohang, 1990 ; 132</p> <p>Daldjoeni, 1992 : 61</p> <p>Bingham dan Miered, 1993 : 3</p> <p>Canter, 1977 : 159</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Topografi</li> <li>- Luas wilayah</li> <li>- Mata pencaharian penduduk</li> <li>- Akses</li> </ul>	Karakteristik Wilayah

No	Subsatansi	Sumber	Variabel	Sasaran
2.	<p>APK adalah perbandingan jumlah siswa seluruhnya dengan penduduk usia sekolah</p> <p>APM adalah perbandingan antara jumlah siswa usia sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah</p> <p>TPS adalah perbandingan jumlah lulusan tingkat SLTP dengan jumlah lembaga Sekolah Menengah</p>	Husaini Usman, 2006:102	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah sekolah</li> <li>- Jumlah siswa</li> <li>- Jumlah penduduk usia 16-18 tahun</li> <li>- Jumlah lulusan SLTP</li> <li>- Jumlah Rombongan Belajar</li> <li>- Jumlah siswa baru SMA</li> </ul>	<p>Penyerapan</p> <p>Lulusan SLTP</p>
3.	<p>Jangkauan / radius sekolah ditempuh oleh penduduk menuju lokasi yang diperhitungkan ialah jarak</p> <p>Penduduk 6000 jiwa dilayani oleh 1 SMA</p> <p>Jenis pelayanan jasa salah satunya termasuk pelayanan pendidikan</p> <p>Jarak tempuh siswa SMA yang berjalan kaki maksimum 6 km</p> <p>Penyebaran sekolah didekati dengan analisis keruangan yang menitik beratkan kepada 3 unsur geografi yaitu jarak (<i>distance</i>), kaitan (<i>interaction</i>) dan gerakan (<i>mo-vement</i>)</p>	<p>Indrafachrudi, 1989 : 142</p> <p>Badan Standar Nasional Pendidikan</p> <p>Budi Sinulingga, 2005 : 27</p> <p>Badan Standar Nasional Indonesia</p> <p>Bintarto, 1982 : 74</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenjang pendidikan</li> <li>- Jumlah sekolah</li> <li>- Jumlah penduduk</li> <li>- Penyebaran sekolah</li> <li>- Jangkauan radius sekolah</li> </ul>	<p>Wilayah Jangkauan Pelayanan dan Pola Sebaran Sekolah</p>

No	Subsatansi	Sumber	Variabel	Sasaran
	<p>Model dalam analisis keruang-an adalah analisis tetangga terdekat (<i>nearest-neighbour analysis</i>)</p> <p>Analisis tetangga terdekat</p>	<p>Haggett, 1968 : 89</p> <p>Bintarto, 1982 : 74-75</p>		
4.	<p>Visi Depdiknas : Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan jaman yang selalu berubah</p> <p>Misi Depdiknas : Mengupayakan perluasan dan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia</p> <p>- Standar Pelayanan Minimal : menetapkan dan memberikan acuan standar pelayanan minimal pendidikan</p>	<p>- Renstra - Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003</p> <p>- Peraturan Pemerintah Gubernur Jateng No 3 Tahun 2005</p>	<p>- Pendidikan memberdayakan semua warga negara</p> <p>- Perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan</p>	Analisis Kebutuhan Sekolah

Sumber : Hasil Penelitian, 2008

## **BAB III**

### **KARAKTERISTIK PENDUDUK DAN FASILITAS PENDIDIKAN KECAMATAN BANDONGAN**

#### **3.1. Karakteristik Penduduk**

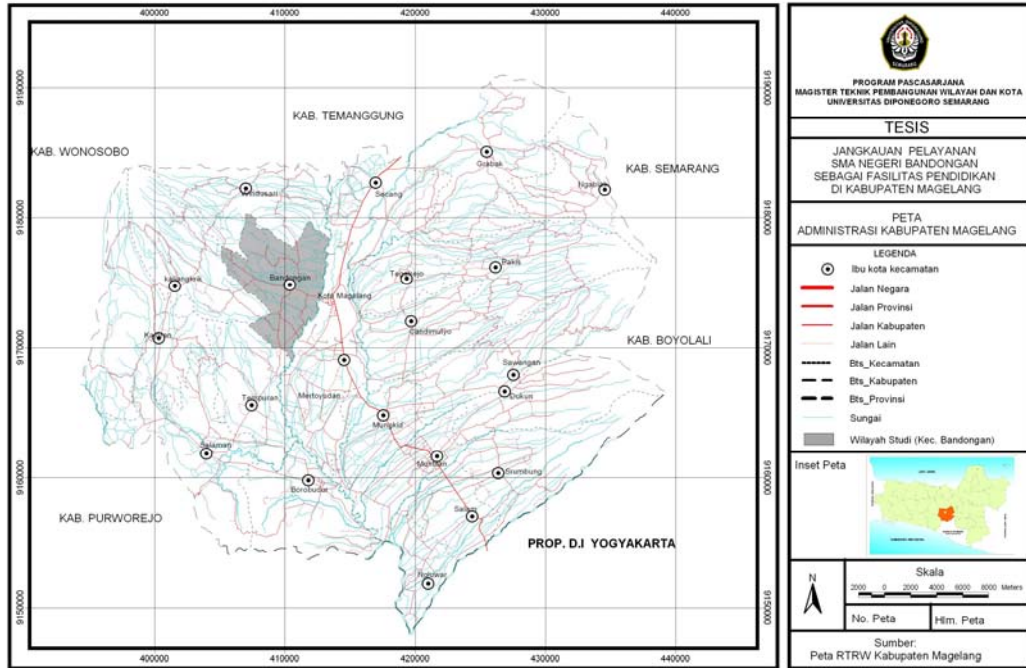
Kecamatan Bandongan adalah salah satu kecamatan dari Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan wilayah Kota Magelang. Dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Windusari
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tempuran
- Sebelah Timur : Kecamatan Kaliangkrik
- Sebelah Barat : Kotamadia Magelang

Secara administrasi Kabupaten Magelang dibagi menjadi 21 kecamatan dan terdiri dari 370 desa dan kelurahan. Luas Kabupaten Magelang tercatat sekitar 108.573 ha atau sekitar 3,34 % dari luas propinsi Jawa Tengah.

Adapun Kecamatan Bandongan merupakan salah satu kecamatan yang terdiri dari 14 desa 115 dusun, 122 RW dan 405 RT dengan luas wilayah 45.79 km<sup>2</sup> . Wilayah Kabupaten Magelang yang terdiri dari 21 kecamatan dapat kita lihat dari Gambar 3.1. sebagai berikut :

#### **3.1. Peta Administrasi Kabupaten Magelang**



Berdasarkan data sekunder dari dokumen BPS Kabupaten Magelang desa-desa yang ada di Kecamatan Bandongan dapat diklasifikasikan sebagai desa tertinggal (IDT), desa dalam pengertian rural area, desa dalam pengertian urban area ( yaitu desa yang telah menunjukkan sifat-sifat perkotaan ) dan desa yang telah bersifat urban area tetapi masih dalam klasifikasi tertinggal. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel III .1 berikut ini :

**TABEL III.1**  
**KLASIFIKASI DESA-DESA DI KECAMATAN BANDONGAN**  
**MENURUT BPS**

NO	Nama Desa	Tertinggal (IDT)	Urban dg IDT	Rural	Urban
1	Sukosari			V	
2	Kedungsari			V	
3	Salamkanci			V	
4	Banyuwangi			V	
5	Trasan				V
6	Bandongan				V
7	Sukodadi	V			
8	Tonoboyo			V	
9	Kebonagung			V	
10	Kalegen			V	
11	Ngepanrejo	V			
12	Gandusari			V	
13	Sidorejo	V			
14	Rejosari	V			

Sumber : Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dalam Angka 2006

Perekonomian Kecamatan Bandongan sumbangan PDRB terbesar adalah pertanian yaitu 33 %. Selanjutnya disusul dengan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, restaurant dan hotel dimana sektor-sektor tersebut memiliki sumbangan lebih dari 10 %. Untuk sektor-sektor lainnya memiliki sumbangan kurang dari 10 %. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel III.2. sebagai berikut :

**TABEL III.2.**  
**PDRB TAHUN 2004-2006 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TH 2000**  
**KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG**

No	Lapangan Usaha	2004	(%)	2005	(%)	2006	(%)
1	Pertanian	30286	33	32430	31	34623	32
	1.1 Tanaman Bahan Makanan	22979	26	24942	24	26790	26
	1.2 Tanaman Perkebunan Rakyat	617	0.6	632	0.6	643	0.6
	1.3 Peternakan & hasil-hasilnya	3499	3.5	3673	3.2	3987	3.2
	1.4 Kehutanan	2603	2.6	2598	2.4	2628	2.3
	1.5 Perikanan	586	0.5	584	0.5	572	0.4
2	Pertambangan dan Penggalian	1594	1.6	1681	1.6	1898	1.6
3	Industri Pengolahan	25603	25	26725	26	28054	25
4	Listrik, Gas dan Air Minum	416	0.6	450	0.6	474	0.6
5	Bangunan / Konstruksi	7328	7.6	7957	7.4	8604	7.5
6	Perdagangan,Restauran dan Hotel	11753	12	12494	13	13278	12

No	Lapangan Usaha	2004	( % )	2005	(%)	2006	(%)
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4750	4.7	4951	4.4	5228	4.2
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5468	6	5791	6.8	6033	6.8
9	Jasa-jasa	6672	7.4	7882	7.9	8461	8
	Jumlah :	93874	100	100364	100	106655	100

*Sumber : Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dalam Angka 2006*

Salah satu penunjang yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian adalah transportasi dan komunikasi. Dengan adanya transportasi lancar, dapat dijadikan indikator dinamisnya kegiatan perekonomian di suatu wilayah. Hal ini juga berkaitan dengan kelancaran transportasi anak-anak sekolah.

Sarana dan prasarana perhubungan baik transportasi dan komunikasi merupakan sarana untuk memperpendek jarak antara daerah satu dengan yang lain. Di Kecamatan Bandongan tidak memiliki transportasi yang lain kecuali transportasi darat seperti : minibus, angkudes, mobil pribadi, sepeda motor, sepeda dan lain-lain yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Semua sarana tersebut ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain, meningkatkan mobilitas manusia ke tempat tujuan baik dari pedesaan sampai ke perkotaan, daerah perbatasan sampai ke daerah terpencil, ataupun membantu kemudahan siswa dari tempat tinggal menuju ke sekolah.

### **3.1.1. Jumlah dan kepadatan Penduduk**

Untuk luas wilayah, jumlah penduduk di Kecamatan Bandongan tahun 2006 seluruhnya sebesar 55.266 jiwa, dapat dilihat pada tabel III.3.

**TABEL III.3**  
**LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK**  
**PER KM2 DIRINCI PER DESA DI KECAMATAN BANDONGAN**  
**TAHUN 2006**

No	Nama Desa	Luas Wilayah (km2)	Jml Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk
1	Sukosari	2,45	1949	796
2	Kedungsari	1,54	2329	1512
3	Salamkanci	3,43	3856	1124
4	Banyuwangi	4,05	5336	1318
5	Trasan	2,75	6988	2540
6	Bandongan	3,63	6888	1898
7	Sukodadi	2,03	2186	1077
8	Tonoboyo	2,16	2895	1340
9	Kebonagung	2,5	2527	1011
10	Kalegen	2,26	2553	1130
11	Ngepanrejo	5,25	4215	803
12	Gandusari	6,03	4089	678
13	Sidorejo	2,69	3069	1141
14	Rejosari	5,02	6386	1272
	Jumlah	45,79	55,266	1207

Sumber : Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dalam Angka 2006

Desa Trasan merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak diantara 14 desa di kecamatan Bandongan, yakni 6.988 jiwa atau 12,64 persen dari total penduduk Kecamatan Bandongan. Sedangkan Desa Sukosari merupakan daerah yang jumlah penduduknya paling sedikit, yaitu hanya sebesar 1.949 jiwa atau 3,53 persen dari total penduduk.

### 3.1.2. Mata Pencaharian penduduk

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Bandongan berumur 10 tahun keatas menurut mata pencaharian tahun 2004 - 2006 dapat dilihat pada tabel III.4 sebagai berikut :

**TABEL III.4**  
**PENDUDUK KECAMATAN BANDONGAN BERUMUR 10 TAHUN**  
**KEATAS MENURUT MATA PENCAHARIAN TAHUN 2004-2006**

No	Mata Pencaharian	2004	2005	2006
1	Petani	9404	8937	8963
2	Buruh Tani	16517	16727	16684
3	Nelayan	-	-	-
4	Pengusaha	312	341	349
5	Buruh Industri	278	287	298
6	Buruh Bangunan	1131	1149	1158
7	Pedagang	1522	1531	1562
8	Pengangkutan	755	734	734
9	PNS/ABRI	1142	1168	1169

No	Mata Pencaharian	2004	2005	2006
10	Pensiunan	269	273	278
11	Lain-lain	10626	10847	10861
	Jumlah	41956	41994	42056

Sumber : Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dalam Angka 2006

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kecamatan Bandongan tergolong wilayah agraris, sehingga tidak mengherankan jika sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian untuk menghidupi keluarganya. Jumlah keluarga yang menggantungkan hidupnya dari buruh tani lebih besar dibandingkan dari petani yang memiliki sawah sendiri. Pedagang menempati posisi berikutnya, kemudian PNS/ABRI disusul dengan penduduk yang bekerja sebagai buruh bangunan dan penduduk yang bekerja diluar sektor-sektor tersebut. Sektor-sektor ini memiliki jumlah diatas 10.000 penduduk. Sedangkan sektor-sektor mata pencaharian lainnya cenderung beragam.

Sedangkan mata pencaharian orang tua siswa SMA Negeri Bandongan tahun 2006 dapat dilihat pada tabel III.5. sebagai berikut :

**TABEL III.5**  
**MATA PENCAHARIAN ORANG TUA TAHUN 2006**

NO	Desa	TNI	PNS	Sopir	Petani	Buruh	Pedagang	Wiras wasta
1	Sukosari				1	2	1	
2	Kedungsari				1	1		
3	Salamkanci		1			1		
4	Banyuwangi				2	5	1	
5	Trasan		1		3	11	2	
6	Bandongan	1	3	1	9	31	11	7
7	Sukodadi	1			3	5	3	
8	Tonoboyo				7	9	4	1
9	Kebonagung				2	3	2	1
10	Kalegen				2	5		
11	Ngepanrejo				1	3	1	
12	Gandusari					2		
13	Sidorejo				5	6	3	2
14	Rejosari			1	1	2		
15	Dari Luar Bandongan	1	2	2	6	30	5	10
	JUMLAH	3	7	4	43	116	33	21
	PROSENTASE	1 %	3 %	2 %	19 %	51 %	15 %	9 %

*Sumber : Data SMA Negeri Bandongan tahun 2006*

Mata pencaharian orang tua siswa tahun 2006 yang masuk sekolah di SMA Negeri 1 Bandongan adalah sebagian besar buruh ( buruh tani, buruh bangunan) sebesar 51 persen, yang kedua adalah petani sebesar 19 persen, kemudian pedagang sebesar 15 persen dan yang kurang dari 10 persen adalah TNI/PNS, sopir, dan wiraswasta.

Pendapatan orang tua siswa SMA Negeri Bandongan tahun 2006 dapat dilihat pada tabel III.6 sebagai berikut :

**TABEL III.6.**  
**PENDAPATAN ORANG TUA TAHUN 2006**

NO	Desa	< dr 750 jt	750 rb – 1 jt	1 jt – 2 jt	2 jt – 3 jt
1	Sukosari	2	1	1	
2	Kedungsari	2			
3	Salamkanci	2			
4	Banyuwangi	5		3	
5	Trasan	11	1	4	1
6	Bandongan	33	7	19	3
7	Sukodadi	8	2	1	1
8	Tonoboyo	14	3	4	
9	Kebonagung	5	1	2	
10	Kalegen	6	1		
11	Ngepanrejo	5			
12	Gandusari	2	3		
13	Sidorejo	12	1	1	

NO	Desa	< dr 750 jt	750 rb – 1 jt	1 jt – 2 jt	2 jt – 3 jt
14	Rejosari	3			
15	Dari Luar Bandongan	10	35	11	1
	JUMLAH	120	55	46	6
	PROSENTASE	53 %	24 %	20 %	3 %

Sumber : Data SMA Negeri Bandongan tahun 2006

Penghasilan orang tua siswa tahun 2006 yang masuk sekolah di SMA Negeri 1 Bandongan adalah terbesar antara 750 ribu ke bawah sebesar 53 persen, yang kedua 750 rb - 1 jt sebesar 24 persen, kemudian 1 jt-2jt sebesar 20 persen dan yang paling sedikit adalah yang berpenghasilan 2 jt-3jt yaitu 3 persen.

### 3.1.3. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan orang tua siswa SMA Negeri Bandongan tahun 2006 dapat dilihat pada tabel III .7. sebagai berikut :

**TABEL III.7**  
**TINGKAT PENDIDIKAN ORANG TUA SISWA SMA NEGERI**  
**BANDONGAN TAHUN 2006**

No	Kelulusan	Jumlah
1	SD	98
2	SLTP	52
3	SLTA	69
4	D II, D III	4
5	SARJANA	4

Sumber : Data SMA Negeri Bandongan tahun 2006

Berdasarkan tabel di atas tingkat pendidikan orang tua siswa SMA Negeri Bandongan tahun 2006 yaitu lulusan SD merupakan jumlah yang paling banyak yaitu sebesar 98 orang, yang kedua adalah lulusan SLTA sebesar 69 orang, yang ke tiga adalah lulusan SLTP sebesar 52 orang, untuk lulusan Diploma dan Sarjana berjumlah 4 orang. Tingkat pendidikan orang tua siswa SMA Negeri Bandongan tahun 2006 dapat dilihat secara rinci pada tabel III. 8 sebagai berikut :

**TABEL III.8**  
**TINGKAT PENDIDIKAN ORANG TUA TAHUN 2006**

NO	Desa	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana
1	Sukosari	3		1		
2	Kedungsari	1		1		
3	Salamkanci			2		
4	Banyuwangi	4	1	3		
5	Trasan	9	2	5		1
6	Bandongan	17	13	27	3	2
7	Sukodadi	7	2	3		
8	Tonoboyo	9	7	5		
9	Kebonagung	5	1	2		
10	Kalegen	5	1	1		
11	Ngepanrejo	3	1	1		
12	Gandusari	1	1			
13	Sidorejo	9	4	3		

NO	Desa	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana
14	Rejosari	3	1			
15	Dari Luar Bandongan	22	18	16	1	1
	JUMLAH	98	52	69	4	4
	PROSENTASE	43 %	23 %	30 %	2 %	2 %

Sumber : Data SMA Negeri Bandongan tahun 2006

Pendidikan orang tua siswa tahun 2006 yang masuk sekolah di SMA Negeri 1 Bandongan adalah sebagian besar lulusan SD yaitu 43 persen, kemudian lulusan SMA sebesar 30 persen dan lulusan SLTP sebesar 23 persen sedangkan untuk lulusan Diploma dan sarjana sebesar 2 persen.

### 3.2. Konsep Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan menurut standar sarana prasarana mencakup : (1) pengadaan satuan pendidikan, (2) kelengkapan prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan gedung, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan, dan (3) kelengkapan sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan.

#### 3.2.1. Pengertian Fasilitas Pendidikan

Pengertian fasilitas pendidikan dalam standar sarana prasarana pendidikan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan ( BSNP ) adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimum tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus yang mudah dihadirkan. Kapasitas maksimum ruang kelas 32 peserta didik. ( Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum ).

Fasilitas pendidikan SMA Negeri Bandongan Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel III.9. sebagai berikut :

**TABEL III.9**  
**FASILITAS PENDIDIKAN SMA NEGERI BANDONGANTAHUN 2006**

NO	URAIAN	LUAS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Luas tanah	10590 m <sup>2</sup>		
2	Ruang			
	a. Ruang Teori/Kelas		14	
	b. Laboratorium IPA		1	
	c. Laboratorium Fisika		1	
	d. Laboratorium Komputer		1	
	e. Ruang Perpustakaan		1	
	f. Ruang UKS		1	

	g. Ruang BP/BK		1	
	h. Ruang Kepala Sekolah		1	
	i. Ruang Guru		1	
	j. Ruang TU		1	
	k. Ruang OSIS		1	
	l. Kamar mandi /WC Guru		2	
	m. Kamar mandi/WC Siswa		8	
	n. Gudang		1	
	o. Ruang Ibadah		1	
3	Perlengkapan Komputer		7	Komputer TU
			20	KBM
4	Ketenagaan			
	a. Kepala Sekolah		1	
	b. Guru		34	
	c. Tenaga Administrasi		9	

*Sumber : SMA Negeri Bandongan Kab. Magelang 2006*

SMA Negeri Bandongan menempati luas tanah seluruhnya 10.590 m<sup>2</sup> yang sudah dipagar permanen termasuk pagar hidup. Dengan bangunan sekolah yang terdiri dari 14 ruang kelas, 1 ruang laboratorium IPA, 1 ruang laboratorium Fisika, 1 ruang laboratorium komputer, 1 ruang UKS, 1 Ruang Kepala Sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang TU, 1 ruang OSIS, 2 Kamar Mandi/WC Guru, 8 Kamar Mandi /WC siswa dan 1 ruang ibadah. Komputer merupakan perlengkapan kegiatan baik kegiatan administrasi maupun Kegiatan Belajar Mengajar, 7 komputer untuk kegiatan administrasi dan 20 komputer untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Ketenagaan berjumlah 44 personil yang terdiri dari 1 orang Kepala Sekolah, 34 orang guru dan 9 orang tenaga administrasi.

### 3.2.2. Kondisi Eksisting SMA Bandongan

Kondisi eksisting SMA yang ada di Kecamatan Bandongan dapat dilihat pada tabel III.10 sebagai berikut :

**TABEL III.10.**  
**JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR, JUMLAH SISWA**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS KECAMATAN BANDONGAN**  
**TAHUN 2005/2006**

No	Nama Sekolah	RO MBEL				SISWA			
		Tk I	Tk II	Tk III	JML	Tk I	Tk II	Tk III	JML
1.	SMA N 1	4	4	4	12	200	198	154	552
2.	SMA Muh Solihin	2	2	2	6	65	50	41	156
	JUMLAH	6	6	6	18	265	248	195	708

*Sumber : Rangkuman Data Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2005/2006*

Berdasarkan tabel di atas jumlah SMA di Kecamatan Bandongan ada 2 sekolah, jumlah siswa sebesar 708 orang dengan rombongan belajar SMA tingkat I – III masing-masing berjumlah 6 rombel dan jumlah rombongan belajar seluruhnya sebanyak 18 rombel. Jumlah siswa, jumlah usia sekolah SMA di Kecamatan Bandongan pada tahun 2005/2006 dapat dilihat pada tabel III.11 sebagai berikut :

**TABEL III.11**  
**JUMLAH SISWA , JUMLAH USIA SEKOLAH SMA**  
**KECAMATAN BANDONGAN TAHUN 2005/2006**

No	Nama Sekolah	JML Siswa	Usia 14-15 th	Usia 16-18 th	Usia 19-21 th	JML
1.	SMA N 1	552	173	379	-	552
2.	SMA Muh Solihin	156	18	120	18	156
	<b>JUMLAH</b>	708	191	499	18	708

*Sumber : Rangkuman Data Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2005/2006*

Berdasarkan tabel di atas jumlah SMA di Kecamatan Bandongan ada 2 sekolah, jumlah siswa sebesar 708 orang dengan yang terdiri dari usia 14-15 tahun sebanyak 191 orang, usia 16 – 18 tahun sebanyak 499 orang dan usia 19-21 sebanyak 10 orang.

### 3.2.3. Tingkat Pelayanan Sekolah

Berdasarkan data profil pendidikan yang ada pada tahun 2004-2006, tingkat pelayanan sekolah di Kecamatan Bandongan pada Tabel III.12 sebagai berikut :

**TABEL III.12**  
**TINGKAT PELAYANAN SEKOLAH KECAMATAN BANDONGAN**  
**TAHUN 2004-2006**

No	Jenjang Pendidikan	2004	2005	2006
1	TK	7	7	7
2	SD	27	27	27
3	SLTP	5	5	5

No	Jenjang Pendidikan	2004	2005	2006
4	SLTA	2	2	2

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Magelang 2006

Tingkat pelayanan sekolah Kecamatan Bandongan dari TK sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tersedia di kecamatan tersebut. Jumlah SLTA baik negeri maupun swasta sebanyak 2 sekolah.

### 3.3. Jangkauan Pelayanan dan Sebaran Sekolah

Jangkauan atau radius sekolah yang harus ditempuh oleh penduduk menuju lokasi sekolah secara nasional jarak capai yang diperhitungkan ialah jarak perjalanan kaki dalam keadaan normal. Untuk sekolah lanjutan jarak 5 km yaitu 1 jam jalan kaki .( Indrafachrudi, dkk (1989: 142)

Terkait dengan pelayanan dalam kota, Weber Walter Christaller (1933) dan August Lösch (1936), secara terpisah mengembangkan teori tempat pusat (*central place theory*). Konsep utama dalam teori ini adalah apa yang dinamakan dengan *the range of good* dan *the threshold value* (UN, 1979 : 53). *Range of good service* merupakan jarak yang ditempuh para konsumen menuju suatu tempat untuk mendapatkan pelayanan, adapun *threshold value* atau *threshold population* merupakan jumlah penduduk minimal yang dibutuhkan suatu unit pelayanan sebelum dapat beroperasi secara menguntungkan (Daldjoeni : 1992 : 104).

Apabila dikaitkan dengan fasilitas pendidikan maka luas jangkauan pelayanan pendidikan minimal sangat tergantung pada tingkat kepadatan penduduk pada wilayah. Makin tinggi kepadatan penduduk makin kecil wilayah jangkauan pelayanan pendidikan begitu juga sebaliknya.

Menurut Teori tempat central jenis pelayanan jasa dapat dikelompokkan kepada :

- a. pelayanan perbaikan (*repair work*) dan pekerjaan lain dari yang sejenis
- b. distribusi dan pengangkutan barang-barang
- c. pelayanan akan administrasi, pendidikan dan informasi
- d. pelayanan keamanan dan kesehatan

Luas pemasaran dari kegiatan pelayanan itu ialah sejauh mana seseorang bersedia untuk berjalan mencapai itu. Apabila jarak ini dilampaui maka seseorang akan mencari pelayanan lain yang lebih dekat. ( Sinulingga, 2005 : 27 )

Perihal jangkauan / radius sekolah yang harus ditempuh oleh penduduk menuju lokasi sekolah, berbagai literatur berbeda-beda seperti :

1. Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2006 tentang standar sarana dan prasarana SMA/MA yaitu satu SMA/MA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA/MA baru.
2. Indrafachudi, dkk (1989: 142) secara nasional jarak capai yang diperhitungkan ialah jarak perjalanan kaki dalam keadaan normal. Untuk sekolah lanjutan diambil jarak 5 km yaitu 1 jam jalan kaki.

3. Badan Standar Nasional Indonesia tentang saran dan prasarana yaitu satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMA/MA dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

Dalam penelitian ini untuk mengukur radius / jarak menuju lokasi sekolah dan pelayanan pendidikan menggunakan menggunakan Badan Standar Nasional Indonesia dengan jarak radius maksimum 6 km dan melayani maksimum 6000 jiwa.

Berdasarkan tabel III.10 jumlah SMA di Kecamatan Bandongan ada 2 sekolah yaitu :

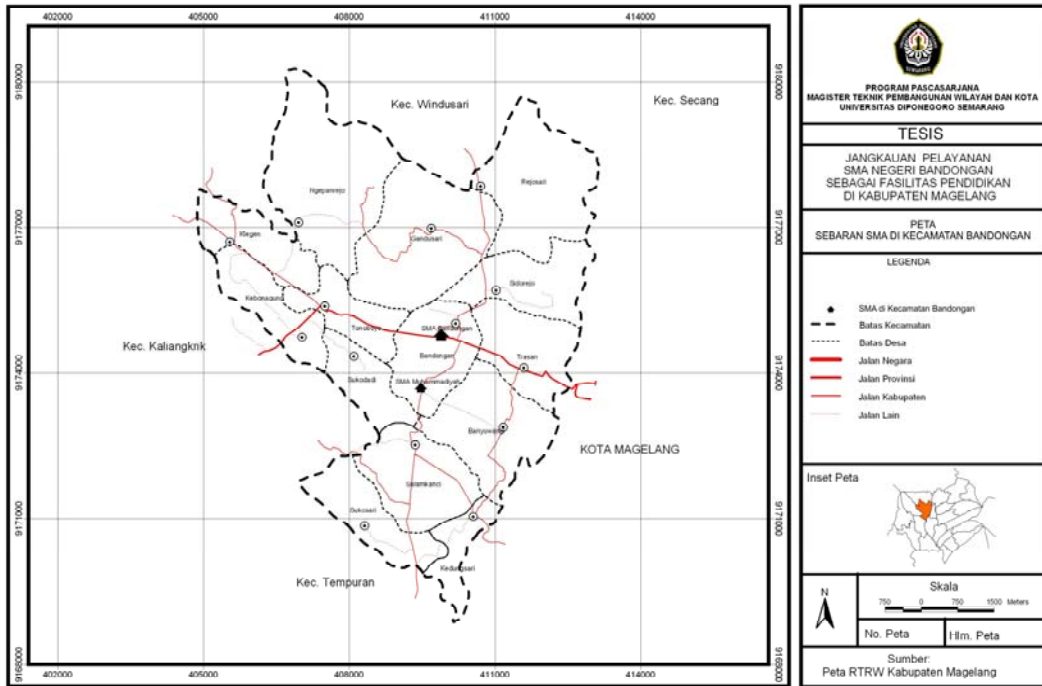
1. SMA Negeri 1 Bandongan
2. SMA Muhammadiyah Solihin

Jumlah rombongan belajar seluruhnya ada 18 rombel, jumlah siswa SMA Tk I sebanyak 265 orang, SMA Tk II sebanyak 248 orang, SMA Tk III sebanyak 191 orang sehingga jumlah siswa keseluruhan ada 708 orang.

Berdasarkan tabel III.11 jumlah siswa usia sekolah SMA di Kecamatan Bandongan dengan usia 14-15 tahun sebanyak 191 orang, usia 16 – 18 tahun sebanyak 499 orang dan usia 19-21 sebanyak 10 orang.

Sebaran SMA di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Tahun 2006/2007 ada 2 SMA yang letak ke dua SMA tersebut berlokasi di Desa Bandongan atau terletak di pusat wilayah dengan jarak antar SMA sejauh 1,5 km. Peta Sebaran SMA di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Tahun 2006/2007 dapat dilihat

pada Gambar 3.2. Peta Sebaran Sekolah SMA di Kecamatan Bandongan sebagai berikut :



  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

**TESIS**

**JANGKALIAN PELAYANAN**  
**SMA NEGERI BANDONGAN**  
**SEBAGAI FASILITAS PENDIDIKAN**  
**DI KABUPATEN MAGELANG**

**PETA**  
**SEBARAN SMA DI KECAMATAN BANDONGAN**

**LEGENDA**

- SMA di Kecamatan Bandongan
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Desa
- Jalan Negara
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Lain

Inset Peta



**Skala**  
  
 0 250 500 750 1000 Meters

No. Peta: | Film. Peta:

Sumber:  
 Peta RTRW Kabupaten Magelang

**BAB IV**  
**ANALISA JANGKAUAN PELAYANAN SMA NEGERI**  
**BANDONGAN SEBAGAI FASILITAS PENDIDIKAN**  
**DI KABUPATEN MAGELANG**

**4.1. Analisis daya tampung sekolah dihitung berdasarkan APK, APM dan Angka Melanjutkan dari tahun 2002-2006**

APK dan APM dalam analisis ini adalah untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan jumlah penduduk usia sekolah adalah usia 16 – 18 tahun.

APK, APM, Angka Melanjutkan dan Rasio siswa per kelas merupakan indikator untuk melakukan diagnosa dalam penentuan jangkauan pelayanan pendidikan.

Dan juga untuk mengkaji jumlah kebutuhan sekolah yang didasarkan atas keperluan masyarakat pada saat ini. Dengan menitik beratkan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan

Untuk menghitung APK, APM, Angka Melanjutkan dan Rasio siswa per kelas dari tahun 2002-2006 diperlukan data jumlah penduduk, jumlah penduduk usia 16-18 tahun, jumlah siswa SMA, Jumlah siswa tingkat SMA usia 16-18 tahun, rombongan belajar, jumlah lulusan SLTP dan jumlah siswa baru SMA tingkat I dari tahun 2002 – 2006 yang dapat dilihat pada Tabel IV.1. sebagai berikut :

**TABEL IV.1.**  
**JUMLAH PENDUDUK,SISWA SMA, LULUSAN SLTP,**  
**ROMBONGAN BELAJAR KECAMATAN BANDONGAN**  
**TAHUN 2002-2006**

NO	URAIAN	Th 2002	Th 2003	Th 2004	Th 2005	Th 2006
1	Jumlah penduduk	51.787	53.220	53.579	53.948	55.266
2	Jumlah penduduk usia 16-18	2.957	3.117	3.202	3.396	3.273
3	Jumlah siswa SMA	563	597	620	708	684
4	Jml siswa Tk SMA usia 16-18 th	384	411	444	499	504
6	Rombongan Belajar (Rombel)	18	18	18	18	18
7	Jumlah lulusan SMP + MTs	453	464	479	494	526
8	Jml siswa baru SMA Tk I	205	207	223	209	249

*Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Magelang 2006*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk seluruhnya Kecamatan Bandongan tahun 2002 sampai tahun 2006 naik sebesar 3.479 atau 0,07 %. Jumlah penduduk usia 16-18 tahun 2002 sampai tahun 2006 juga naik sebesar 316 atau 0,11 %. Jumlah siswa SMA tahun 2002 sampai tahun 2006 naik sebesar 121 atau 0,21 %. Jumlah siswa tingkat SMA usia 16-18 tahun 2002 sampai tahun 2006 naik sebesar 120 atau 0,31 %. Rombongan belajar berjumlah 18 rombel. Kemudian jumlah lulusan SLTP Kecamatan Bandongan tahun 2002 sampai tahun 2006 naik sebesar 73 atau 0,16 %. Dan jumlah siswa baru SMA tingkat I tahun 2002 sampai tahun 2006 naik sebesar 44 atau 0,21 %. Perkembangan penduduk maupun siswa usia sekolah dan siswa yang melanjutkan ke sekolah SMA di Kecamatan Bandongan dari tahun 2002-2006 semuanya mengalami kenaikan. Kenaikan yang tertinggi adalah

siswa tingkat SMA usia 16-18 yaitu sebesar 0,31 % dan kenaikan yang terendah adalah jumlah penduduk yaitu sebesar 0,07 %. Jumlah kelulusan SLTP Kecamatan Bandongan tahun 2006 sebesar 526 siswa yang tertampung di SMA di Kecamatan tersebut sebesar 249 siswa jadi yang tidak tertampung atau yang tidak melanjutkan di kecamatan tersebut sebesar 277 orang.

Untuk menghitung APK, APM, Angka Melanjutkan dan Rasio Siswa /Kelas dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1). Angka Partisipasi Kasar ( APK ) SMA

Cara Analisis :

$$\text{APK} = \frac{\text{Jumlah siswa seluruhnya}}{\text{Jumlah penduduk 16 – 18 tahun}} \times 100$$

Analisis Angka Partisipasi Kasar ( APK ) Kecamatan Bandongan tahun 2002 – 2006 dapat dilihat pada tabel IV.2. sebagai berikut :

**TABEL IV.2.**  
**ANGKA PARTISIPASI KASAR ( APK ) KECAMATAN BANDONGAN**  
**TAHUN 2002 – 2006**

No	URAIAN	THN 2002	THN 2003	THN 2004	THN 2005	THN 2006
1.	Jumlah siswa seluruhnya	563	597	620	708	684
2.	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	2.957	3.117	3.202	3.396	3.273
3.	Angka Partisipasi Kasar ( APK ) dlm %	19,04	19,15	19,36	20,85	20,90

*Sumber : Hasil penelitian, 2008*

Hasil analisis Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kecamatan Bandongan tahun 2002 sebesar 19,04 % kemudian tahun 2003 naik menjadi 19,15 % tahun 2004 sebesar 19,36 % tahun 2005 sebesar 20,85 % dan pada tahun 2006 menjadi 20,90 %. Dari hasil prosentase tersebut kenaikan APK dari tahun ke tahun semakin meningkat perkembangannya meskipun tidak begitu signifikan yaitu sebesar 0,11 % tahun berikutnya naik 0,21 % kemudian 1,49 % dan 0,05 %. Dari tahun 2002 sampai tahun 2006 naik sebesar 1,86 %. Meskipun APK Kecamatan Bandongan naik dari 19,04 % menjadi 20,90 % namun masih tergolong rendah. Nilai APK yang diharapkan adalah 100 % hal ini berarti bahwa masih 79,10 % penduduk usia 16-18 tahun di Kecamatan Bandongan yang belum terlayani melanjutkan ke jenjang SMA.

## 2). Angka Partisipasi Murni ( APM ) SMA

Cara Analisis :

$$\text{APM} = \frac{\text{Jumlah siswa tingkat SMA usia 16-18 th}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100$$

Analisis Angka Partisipasi Murni ( APM ) Kecamatan Bandongan tahun 2002 – 2006 dapat dilihat pada tabel IV.3. sebagai berikut :

**TABEL IV.3.**  
**ANGKA PARTISIPASI MURNI ( APM ) KECAMATAN BANDONGAN**  
**TAHUN 2002 – 2006**

No	URAIAN	THN 2002	THN 2003	THN 2004	THN 2005	THN 2006
1.	Jumlah siswa tingkat SMA Usia 16-18 tahun	384	411	444	499	504
2.	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	2.957	3.117	3.202	3.396	3.273
3.	Angka Partisipasi Murni ( APM ) dalam %	12,99	13,19	13,87	14,69	15,40

*Sumber : Hasil penelitian, 2008*

Hasil analisis Angka Partisipasi Murni (APM) di Kecamatan Bandongan tahun 2002 sebesar 12,99 % kemudian tahun 2003 naik menjadi 13,19 % tahun 2004 sebesar 13,87 % tahun 2005 sebesar 14,69 % dan pada tahun 2006 menjadi 15,40 %. Dari hasil prosentase tersebut kenaikan APM dari tahun ke tahun semakin meningkat yaitu sebesar 0,20 % tahun berikutnya naik 0,68 % kemudian 0,82 % dan 0,71 %. Dari tahun 2002 sampai tahun 2006 naik sebesar 2,41 %. Meskipun APM Kecamatan Bandongan naik dari 12,99 % menjadi 15,40 % namun masih tergolong rendah. Masih 84,60 % penduduk usia 16-18 tahun di Kecamatan Bandongan yang belum terlayani di SMA Kecamatan Bandongan.

### 3). Menghitung Angka Melanjutkan

Cara analisis :

Menghitung jumlah lulusan tingkat SLTP yang melanjutkan ke SMA

Analisis Angka Melanjutkan Kecamatan Bandongan tahun 2002 – 2006 dapat dilihat pada tabel IV.4. sebagai berikut :

**TABEL IV.4.**  
**ANGKA MELANJUTKAN KECAMATAN BANDONGAN**  
**TAHUN 2002 – 2006**

No	URAIAN	THN 2002	THN 2003	THN 2004	THN 2005	THN 2006
1.	Jumlah siswa lulusan SLTP	453	464	479	494	526
2.	Jumlah siswa Tk I SMA	205	207	223	209	249
3.	Angka Melanjutkan dalam %	45,25	44,61	46,56	42,31	47,34

*Sumber : Hasil penelitian,2008*

Hasil analisis Angka Melanjutkan di Kecamatan Bandongan tahun 2002 sebesar 45,25 % kemudian tahun 2003 turun menjadi 44,61 % tahun 2004 naik menjadi 46,56 % tahun 2005 turun menjadi 42,31 % dan pada tahun 2006 naik lagi menjadi 47,34 %. Dari hasil prosentase tersebut Angka melanjutkan perkembangannya tidak stabil yaitu turun naik dari tahun 2002-2006. Tahun 2002 ke tahun 2003 turun sebesar 0,64 % tahun 2003 ke 2004 naik 1,95 % kemudian tahun

2004 ke 2005 turun 4,25 % dan pada tahun 2005 ke 2006 naik lagi sebesar 5,03 %. Dari tahun 2002 ke tahun 2006 meningkat persentasenya dari 45,25 % menjadi 47,34 %. Tidak semua lulusan SLTP Kecamatan Bandongan melanjutkan ke SMA hanya 47,34 % yang melanjutkan di Kecamatan tersebut dari jumlah lulusan tahun 2006 sebesar 526 siswa yang melanjutkan ke SMA di Kecamatan Bandongan sebanyak 249 siswa. Masih banyak lulusan SLTP yang belum tertampung di kecamatan Bandongan yaitu 277 orang. Ada sebagian melanjutkan ke SMA luar Kecamatan Bandongan, ada yang bekerja, menikah dan ada yang menganggur.

#### 4). Menghitung Rasio Siswa / Kelas

Cara Analisis :

$$\text{Rasio Siswa / Kelas} = \frac{\text{Jumlah siswa}}{\text{Jumlah kelas}}$$

Analisis Rasio Siswa per Kelas Kecamatan Bandongan tahun 2002 – 2006 dapat dilihat pada tabel IV.5. sebagai berikut :

**TABEL IV.5.**  
**RASIO SISWA PER KELAS KECAMATAN BANDONGAN**  
**TAHUN 2002 – 2006**

No	URAIAN	THN 2002	THN 2003	THN 2004	THN 2005	THN 2006
1.	Jumlah siswa	563	597	620	708	684

No	URAIAN	THN 2002	THN 2003	THN 2004	THN 2005	THN 2006
2.	Jumlah kelas	18	18	18	18	18
3.	Rasio siswa per kelas	31,27	33,16	34,44	39,33	38,00

*Sumber : Hasil penelitian, 2008*

Hasil Analisis Rasio siswa / kelas di Kecamatan Bandongan tahun 2002 sebesar 31, tahun 2003 sebesar 33, tahun 2004 sebesar 34 dan tahun 2005 menjadi 39 kemudian pada tahun 2006 sebesar 38. Hasil kenaikan rasio dari tahun ke tahun sebesar tahun 2002 ke 2003 sebesar 2, 2003 ke 2004 sebesar 1, 2004 ke 2005 sebesar 5 sedangkan dari tahun 2005 ke 2006 turun 1. Kapasitas maksimum ruang kelas untuk SMA adalah 32 peserta didik. Dilihat dari perkembangan rasio siswa / kelas dari tahun 2002-2006, hanya pada tahun 2002 yang mempunyai rasio ideal karena tidak melebihi kapasitas sedangkan dari tahun 2003-2006 melebihi dari kapasitas yaitu tahun 2003 kelebihan 1 siswa, tahun 2004 kelebihan 2 siswa, tahun 2005 kelebihan 7 siswa dan tahun 2006 kelebihan sebanyak 6 siswa.

Perkembangan APK, APM, Angka Melanjutkan dan Rasio siswa per kelas di wilayah Kecamatan Bandongan dari tahun 2002-2006 dapat dilihat pada tabel IV.6. sebagai berikut :

**TABEL IV.6.**  
**PERKEMBANGAN PROSENTASI APK, APM, ANGKA**  
**MELANJUTKAN DAN RASIO SISWA/KELAS KECAMATAN**  
**BANDONGAN TAHUN 2002-2006**

NO	URAIAN	Th 2002 (%)	Th 2003 (%)	Th 2004 (%)	Th 2005 (%)	Th 2006 (%)
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	19,04	19,15	19,36	20,85	20,90
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	12,99	13,19	13,87	14,69	15,40
3	Angka Melanjutkan	45,25	44,61	46,56	42,31	47,34
4	Rasio Siswa/Kelas	31,27	33,16	34,44	39,33	38,00

*Sumber : Hasil penelitian, 2008*

Dalam tabel IV.6 dapat dilihat hasil analisis APK, APM, Angka Melanjutkan dan Rasio siswa per kelas di wilayah Kecamatan Bandongan dari tahun 2002-2006 sebagai berikut :

- a. Perkembangan APK dari tahun 2002-2006 semakin meningkat, namun demikian APK yang sebesar 20,90 % masih tergolong rendah. APK Kecamatan Bandongan selama lima tahun tersebut meskipun mengalami peningkatan tetapi prosentasenya masih rendah berarti di Kecamatan Bandongan diperlukan alternatif pendidikan jenjang SMA untuk memperluas kesempatan belajar dalam rangka melayani siswa lulusan tingkat SLTP yang akan melanjutkan yaitu dengan membuka ruang kelas baru.

- b. Perkembangan APM Kecamatan Bandongan selama lima tahun dari 2002-2006 tersebut mengalami kenaikan atau peningkatan hal ini berarti bahwa jumlah penduduk usia 16-18 tahun semakin banyak yang melanjutkan ke SMA, oleh karena itu di Kecamatan Bandongan diperlukan alternatif pendidikan untuk memperluas kesempatan belajar dalam rangka melayani siswa lulusan tingkat SLTP yang akan melanjutkan.
- c. Lulusan SLTP di Kecamatan Bandongan yang belum bisa tertampung di kecamatan tersebut sebesar 277 orang, Untuk membuka Unit Sekolah Baru SMA diperlukan 240 siswa, melihat kenyataan yang ada Kecamatan Bandongan lulusan SLTP yang belum tertampung sebesar 277 orang maka perlu adanya Pembangunan Unit Sekolah Baru atau dengan membuka Paket C bagi lulusan yang bekerja tapi tetap ingin melanjutkan sekolah.
- d. Rasio siswa / kelas Kecamatan Bandongan dari tahun 2002-2006 semakin meningkat hal ini berarti semakin banyak lulusan SLTP yang melanjutkan ke jenjang SMA. Serta dari tahun 2003-2006 melebihi kapasitas maksimum, tahun 2005 kelebihan 7 siswa tiap kelas dan tahun 2006 kelebihan 6 siswa tiap kelas. Oleh karena itu perlu adanya suatu penambahan ruang kelas baru.

Daya tampung SMA Negeri Bandongan berdasarkan prosentase jumlah peserta didik yang terserap di SMA tersebut. Daya tampung SMA Negeri 1 Bandongan Kabupaten Magelang tahun 2006 dapat dilihat pada tabel IV.7. sebagai berikut :

**TABEL IV.7.**  
**DAYA TAMPUNG SMA NEGERI BANDONGAN TAHUN 2006**

No	Asal Sekolah	Jumlah yang terserap	% Penyerapan
1	SMP Negeri 1 Bandongan	76	33,4 %
2	SMP Negeri 2	7	3 %
3	SMP PGRI Bandongan	5	2,2 %
4	SMP Ma'arif	5	2,2 %
5	SMP Muhammadiyah	18	7,93 %
6	MTs Al-Munir	1	0,44 %
7	MTs Ma'arif Rejosari	-	-
8	MTs Roudl Salamkanci	-	-
9	SLTP Luar Daerah		
	a. Kecamatan Kaliangkrik	56	24,67 %
	b. Kecamatan Windusari	25	11,1 %
	c. Kota Magelang	25	11,1 %
	d. Kecamatan Tempuran	4	1,76 %
	e. Kecamatan Secang	1	0,44 %
	f. Luar Kota	4	1,76 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>227</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Hasil penelitian, 2008

Dari tabel IV.7. di atas dapat dilihat bahwa Daya Tampung Sekolah dari asal siswa yang terserap di SMA Negeri Bandongan paling banyak berasal dari SMP Negeri 1 dengan jumlah 76 orang atau 33,4 persen, kemudian yang kedua berasal dari luar kecamatan Bandongan sebesar 56 orang atau 24,67 persen yang berasal dari Kecamatan Kaliangkrik, ketiga juga berasal dari luar Kecamatan Bandongan sebesar 25 orang atau 11,1 persen berasal dari Kecamatan Windusari dan Kotamadia Magelang. Kemudian dari SMP Muhammadiyah 18 orang atau 7,93 persen. Dari SMP Negeri 2 sebanyak 7 orang atau 3 persen, SMP PGRI dan SMP Ma'arif sebanyak 5 orang atau 2,2 persen MTs Al-Munir sebanyak 1 orang atau 0,44 persen. Namun demikian masih ada 2 sekolah yang lulusannya belum bisa terlayani ke SMA Negeri Bandongan yaitu dari MTs Ma'arif Rejosari dan MTs Roudl Salamkanci. Prosentase Daya Serap Sekolah di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dihitung dari asal SLTP yang terserap di SMA Negeri Bandongan adalah sebagai berikut :

- a. Dari Kecamatan Bandongan sebesar 49,17 persen
- b. Dari luar kecamatan Bandongan 50,83 persen.

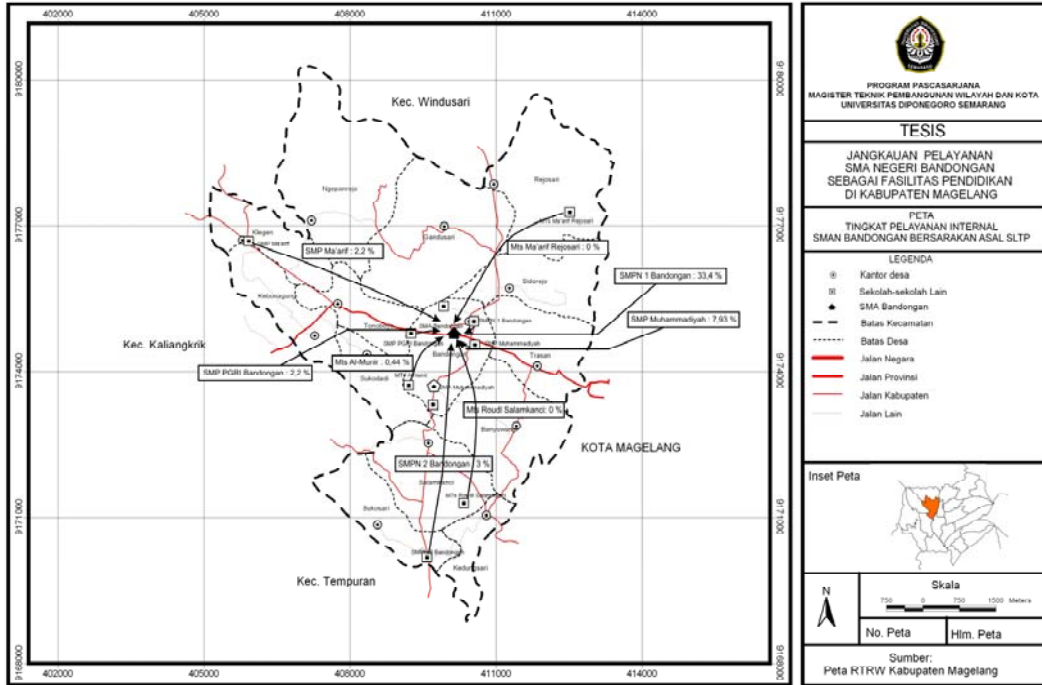
Hal ini terjadi karena belum adanya sistem rayonisasi pendidikan di wilayah Kecamatan Bandongan. Jadi lulusan SLTP dari manapun juga bisa melanjutkan ke SMA Negeri Bandongan.

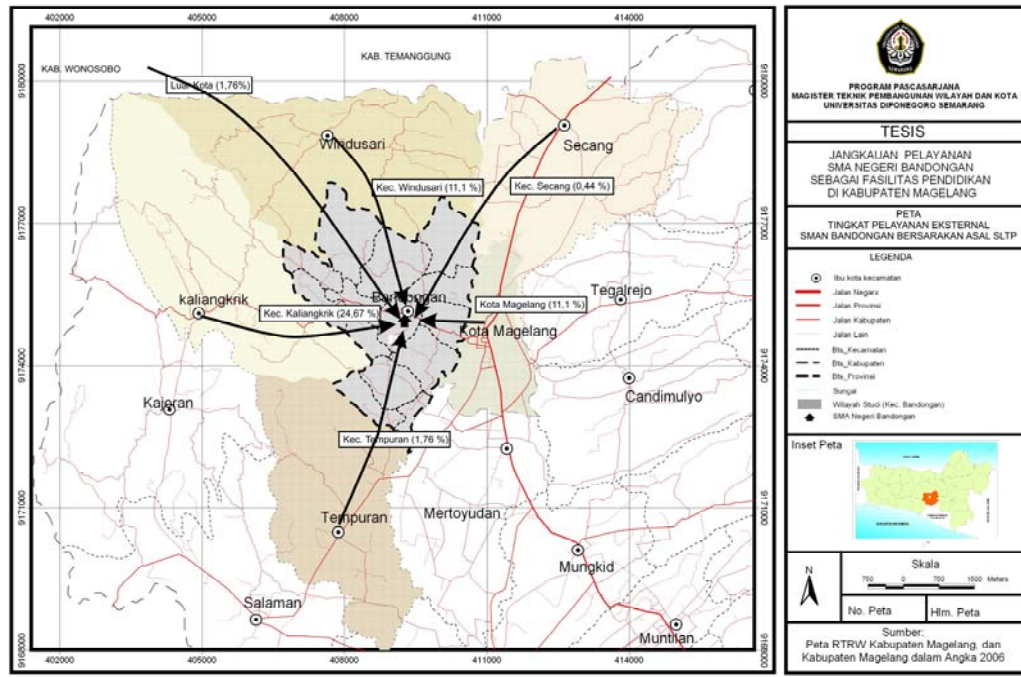
Berdasarkan hasil analisis daya tampung sekolah di wilayah Kecamatan Bandongan yang ditinjau dari perhitungan APK, APM, Angka Melanjutkan dan Rasio Siswa per kelas mencapai di wilayah Kecamatan Bandongan mencapai 38

peserta didik hal ini melebihi kapasitas. Berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2006 kapasitas maksimum ruang kelas adalah 32 peserta didik.

Prosentase Daya Serap Sekolah di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang secara Internal dan Eksternal dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

- a. Gambar 4.1. Prosentase Daya Serap Internal
- b. Gambar 4.2. Prosentase Daya Serap Eksternal





#### 4.2. Analisis Jangkauan Pelayanan Pendidikan dan Pola Sebaran Sekolah

Analisis jangkauan pelayanan pendidikan SMA Negeri Bandongan Kabupaten Magelang dengan indikator asal SLTP dan jarak tempuh atau radius dari tempat tinggal ke sekolah dapat dilihat pada tabel IV.8. sebagai berikut :

**TABEL IV.8.**  
**JANGKAUAN PELAYANAN SMA NEGERI BANDONGAN**  
**BERDASARKAN ASAL SLTP DAN RADIUS (KM2)**

No	Asal Sekolah	Jangkauan ( Radius km2 )
1	SMP Negeri 1 Bandongan	1,5 km
2	SMP Negeri 2 Bandongan	9 km
3	SMP PGRI Bandongan	1,5 km
4	SMP Ma'arif	6 km
5	SMP Muhammadiyah	1,5 km
6	MTs Al-Munir	2 km
7	MTs Ma'arif Rejosari	6 km
8	MTs Roudl Salamkanci	5,5 km
9	SLTP Luar Daerah	
	a. Kecamatan Kaliangkrik	9 km
	b. Kecamatan Windusari	9 km
	c. Kota Magelang	7 km
	d. Kecamatan Tempuran	9 km
	e. Kecamatan Secang	15 km
	f. Luar Kota	

Sumber : Hasil penelitian,2008

Jangkauan pelayanan SMA Negeri Bandongan berdasarkan asal SLTP dan jarak tempuh dapat dilihat yang pertama dari asal sekolah yaitu jumlah SLTP yang ada di Kecamatan Bandongan 8 sekolah terdiri dari 5 SMP dan 3 MTs. Yang kedua dari jarak tempuh yang terjauh 9 km yang terdekat berasal sejauh 1,5 km.

Jangkauan Pelayanan sekolah SMA Negeri Bandongan berdasarkan tabel IV.8. dapat dilihat dari radius / jarak tempuh sekolah asal menuju ke sekolah tujuan sebagai berikut :

- a. Berjarak 1,5 km ada 3 SLTP yaitu SMP Negeri 1 Bandongan, SMP PGRI Bandongan dan SMP Muhammadiyah.
- b. Berjarak 2 km ada 1 SLTP yaitu MTs Al-Munir.
- c. Berjarak 5,5 km ada 1 SLTP yaitu MTs Roudl Salamkanci.
- d. Berjarak 6 km ada 2 SLTP yaitu SMP Ma'arif dan MTs Ma'arif Rejosari.
- e. Berjarak 9 km ada 1 SLTP yaitu SMP Negeri 2.
- f. Dari luar kecamatan Bandongan yaitu dari Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Windusari, Kecamatan Tempuran ketiganya berjarak 9 km, Secang berjarak 15 km, Kota Magelang berjarak 7 km dan ada juga dari luar kota Magelang.

Berdasarkan Teori Tempat Pusat jangkauan pelayanan SMA Negeri Bandongan sudah menjangkau wilayah di kecamatan setempat bahkan sampai keluar kecamatan.

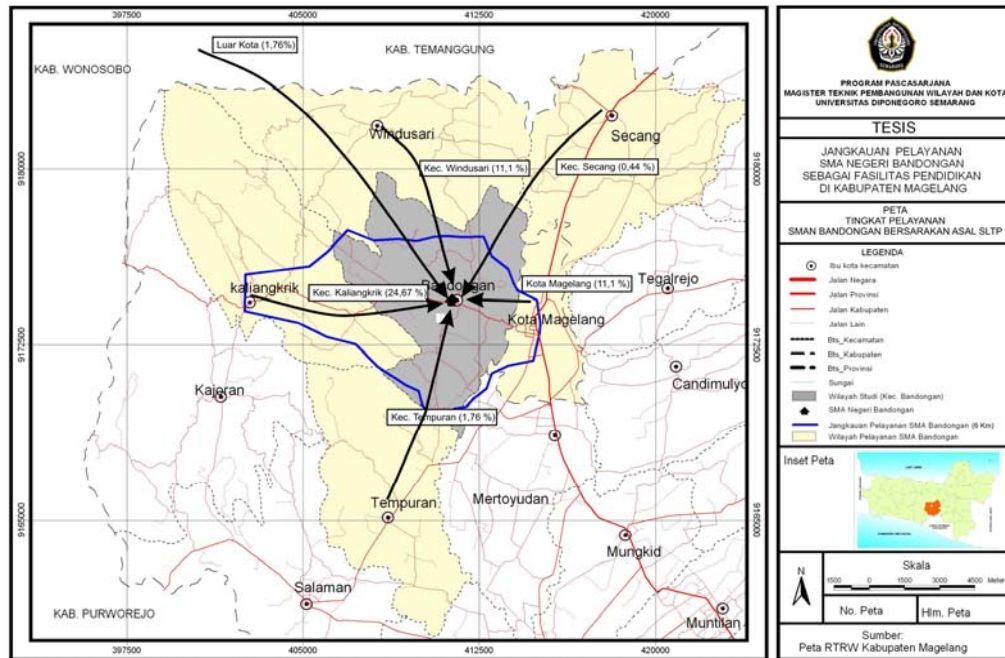
Berdasarkan Badan Standar Nasional Indonesia tahun 2006 pelayanan radius menuju sekolah maksimum 6 km tetapi di wilayah Kecamatan Bandongan mencapai 9 km karena transportasi dan jaringan jalan menuju ke lokasi sekolah mudah dan lancar. Ada 6 wilayah dari luar Kecamatan Bandongan yang masuk di Kecamatan Bandongan karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang berdekatan dengan kecamatan Bandongan, dan kemudahan akses menuju lokasi yaitu jaringan jalan baik, transportasi mudah serta lancar. Jangkauan Pelayanan SMA Negeri Bandongan dengan wilayah yang berdekatan dapat dilihat pada peta Jangkauan Pelayanan SMA Negeri Bandongan yaitu daerah yang diberi warna merupakan wilayah yang terjangkau oleh Kecamatan Bandongan kemudian garis warna biru adalah jarak tempuh menuju lokasi sejauh 6 km dari tempat asal.

Wilayah luar Kecamatan Bandongan yang terlayani di SMA Negeri Bandongan berdasarkan asal SLTP dengan jarak tempuh sejauh lebih dari 6 km menuju lokasi sekolah antara lain dari Kota Magelang sebesar 11,1 persen, Kecamatan Kaliangkrik sebesar 24,67 persen, Kecamatan Tempuran 1,76 persen, Kecamatan Secang sebesar 0,44 persen, dan Kecamatan Windusari sebesar 11,1 persen. Masuk ke wilayah Kecamatan Bandongan karena kemudahan akses menuju lokasi, jaringan jalan baik transportasi mudan dan lancar .

Tetapi masih ada 2 SLTP di wilayah Kecamatan Bandongan yang lulusannya tidak terserap di SMA Negeri Bandongan yaitu MTs Ma'arif dan MTs Roudl Salamkanci. Jangkauan pelayanan pendidikan SMA Negeri Kecamatan Bandongan

di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada peta jangkauan pelayanan sekolah pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.4. sebagai berikut :





Analisis Sebaran Sekolah di wilayah Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dihitung dari jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangga terdekat antar sekolah. Menghitung sebaran sekolah dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$T = \frac{J_u}{J_h}$$

T = indeks penyebaran tetangga terdekat

J<sub>u</sub> = jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangganya yang terdekat.

J<sub>h</sub> = jarak rata-rata yang diperoleh andaikata semua titik mempunyai pola random.

Apabila nilai T = 0, pola penyebarannya bersifat mengelompok, T = 1 berpola random dan T = 2,15, berpola seragam.

Analisis sebaran sekolah SLTP di wilayah Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel IV.9. yaitu jarak antar sekolah sebagai berikut :

**TABEL IV.9.**  
**JARAK ANTAR SEKOLAH**

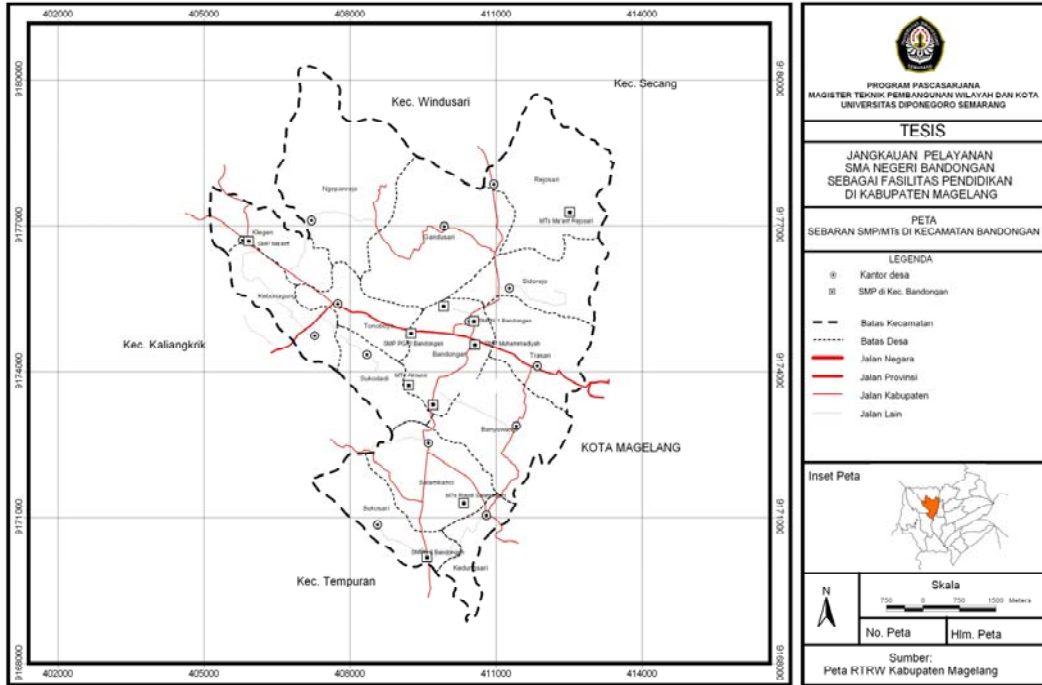
	<b>SMP 1</b>	<b>SMP 2</b>	<b>SMP PGRI</b>	<b>SMP Ma'arif</b>	<b>SMP Muh.</b>	<b>MTs Al- Munir</b>	<b>MTs Ma'arif</b>	<b>MTs Rdl Salam kanci</b>
SMP 1	0	9	1,5	6	1,5	4	6	5,5
SMP 2	9	0	8	14	9	9	14	3,5
SMP PGRI	1,5	8	0	6	1,5	1,5	6	5,5
SMP Ma'arif	6	14	6	0	6	6	11	11,5
SMP Muh.	1,5	9	1,5	6	0	1,5	6	5,5
MTs Al- Munir	4	9	1,5	6	1,5	0	6	5,5
MTs Ma'arif	6	14	6	11	6	6	0	10,5
MTs Rdl Salam kanci	5,5	3,5	5,5	11,5	5,5	5,5	10,5	0

*Sumber : Hasil penelitian, 2008*

Hasil analisis :

$$\begin{aligned}
 J_u &= \frac{9+1,5+6+1,5+4+6+5,5+8+14+9+9+14+3,5+6+1,5+1,5+6+5,5+6+6+11+11,5+1,5+6+5,5+6+5,5+10,5}{28} \\
 &= 181 : 28 \\
 &= 6,46 \\
 J_h &= 1 \\
 T &= 6,46 : 1 \\
 T &= 6,46
 \end{aligned}$$

Sesuai dengan analisis tetangga terdekat sebaran sekolah yang ada di Wilayah Kecamatan Bandongan adalah dengan jarak rata-rata antar sekolah sejauh 6,46 km. Pola penyebaran sekolah dengan nilai T sebesar 6,46 km berarti pola penyebaran SLTP di wilayah Kecamatan Bandongan adalah Pola Seragam. Artinya jarak antara SLTP satu dengan SLTP lainnya banyak yang sama yaitu sejauh 6,46 km. Sebaran Sekolah SLTP di wilayah Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Peta 4.5. sebagai berikut :



### 4.3. Menghitung Kebutuhan Sekolah Berdasarkan Daya Tampung dan

#### Jangkauan Pelayanan

Kebutuhan sekolah di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang khususnya untuk Sekolah Menengah Atas ( SMA ) berdasarkan daya tampung dan jangkauan pelayanan selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2002 – 2006 digunakan untuk merencanakan kebutuhan sekolah yang ada di wilayah tersebut.

Jangkauan Pelayanan SMA Negeri Bandongan berdasarkan prosentase penyerapan dan radius tahun 2006 dapat dilihat pada tabel IV.10 sebagai berikut :

**TABEL IV.10**  
**JANGKAUAN PELAYANAN SMA NEGERI BANDONGAN**  
**BERDASARKAN PROSENTASE DAN RADIUS TAHUN 2006**

NO	ASAL SEKOLAH	Prosentase Penyerapan	Jangkauan Radius (Km)
1	SMP Negeri 1 Bandongan	33,4 %	1,5 km
2	SMP Negeri 2	3 %	9 km
3	SMP PGRI Bandongan	2,2 %	1,5 km
4	SMP Ma'arif	2,2 %	6 km
5	SMP Muhammadiyah	7,93 %	1,5 km
6	MTs Al-Munir	0,44 %	2 km
7	MTs Ma'arif Rejosari	-	6 km
8	MTs Roudl Salamkanci	-	5,5 km
9	SLTP Luar Daerah a. Kecamatan Kaliangkrik	24,67 %	9 km

b.	Kecamatan Windusari	11,1 %	9 km
c.	Kota Magelang	11,1 %	7 km
d.	Kecamatan Tempuran	1,76 %	9 km
e.	Kecamatan Secang	0,44 %	15 km
f.	Luar Kota	1,76 %	

*Sumber : Hasil penelitian, 2008*

Jangkauan pelayanan SMA Negeri Bandongan Kabupaten Magelang dilihat dari jarak tempuh/ radius tempat tinggal menuju sekolah sudah dapat menjangkau pelayanan pendidikan di wilayah Kecamatan Bandongan bahkan sampai keluar kecamatan. Tetapi masih ada 2 SLTP di kecamatan tersebut yang belum bisa terlayani yaitu MTs Ma'arif Rejosari dan MTs Roudl Salamkanci.

Kemudian jika dilihat dari asal SLTP prosentase daya serapnya adalah 49,17 persen berasal dari Kecamatan Bandongan sedangkan 50,83 persen adalah dari luar kecamatan Bandongan yaitu dari Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Windusari, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Secang dan Kotamadia Magelang bahkan ada dari luar kota Magelang . Hal ini terjadi karena belum ada sistem rayonisasi pendidikan di wilayah Kecamatan Bandongan, sehingga lulusan dari SLTP manapun juga bisa masuk ke SMA Negeri Bandongan Kabupaten Magelang.

Angka Partisipasi Kasar ( APK ) Kecamatan Bandongan dari tahun 2002-2006 naik dari 19,04 persen menjadi 20,90 persen namun masih tergolong rendah. Nilai APK yang diharapkan adalah 100 persen hal ini berarti bahwa masih 79,10

persen penduduk usia 16-18 tahun di Kecamatan Bandongan yang belum terlayani melanjutkan ke jenjang SMA.

Angka Partisipasi Murni ( APM ) Kecamatan Bandongan tahun 2002 – 2006 naik dari 12,99 persen menjadi 15,40 persen ini juga masih tergolong rendah. Masih 84,60 persen penduduk usia 16-18 tahun di Kecamatan Bandongan yang belum terlayani di SMA Kecamatan Bandongan.

Belum semua lulusan SLTP Kecamatan Bandongan melanjutkan ke SMA hanya 47,34 % yang melanjutkan di kecamatan tersebut dari jumlah lulusan tahun 2006 sebesar 526 siswa yang melanjutkan ke SMA di Kecamatan Bandongan sebanyak 249 siswa. Jadi lulusan SLTP yang belum tertampung di Kecamatan Bandongan sebesar 277 orang atau 8 rombongan belajar.

Berdasarkan Standar Sarana dan Prasarana Sekolah pendirian gedung sekolah baru untuk satuan pendidikan SMA/MA minimum memiliki 3 rombongan belajar, sedangkan lulusan yang belum terlayani di wilayah ini ada 8 rombongan belajar, hal ini berarti perlu penambahan satu Unit Sekolah Baru ( USB) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di wilayah Kecamatan Bandongan.

Kapasitas maksimum ruang kelas untuk SMA adalah 32 peserta didik. Dilihat dari perkembangan rasio siswa / kelas dari tahun 2002-2006, hanya pada tahun 2002 yang mempunyai rasio ideal karena tidak melebihi kapasitas sedangkan dari tahun 2003-2006 melebihi dari kapasitas yaitu tahun 2003 kelebihan 1 siswa, tahun 2004 kelebihan 2 siswa, tahun 2005 kelebihan 7 siswa dan tahun 2006 kelebihan sebanyak

6 siswa. Jadi daya tampung di Kecamatan Bandongan melebihi kapasitas sehingga perlu pembangunan ruang kelas baru.

Dari hasil analisis di atas bahwa daya tampung yang melebihi kapasitas, APK rendah, APM rendah, angka melanjutkan yang terus meningkat, jangkauan pelayanan yang menjangkau sampai keluar wilayah maka dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk Kecamatan Bandongan masih sangat membutuhkan pengembangan fasilitas pendidikan baik menambah Ruang Kelas Baru ( RKB ) bahkan dengan penambahan satu Unit Sekolah Baru ( USB ) SMA untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari berbagai indikator di atas dimungkinkan untuk menambah satu Unit Sekolah Baru yang ditempatkan di wilayah Kecamatan Bandongan karena di wilayah kecamatan tersebut lulusan yang belum terlayani sebesar 277 orang atau 8 rombongan belajar sedangkan untuk membuka satu unit sekolah baru SMA persyaratan minimum memiliki 3 rombongan belajar.

Untuk penempatan lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru SMA yang sesuai dengan kebutuhan di wilayah Kecamatan Bandongan adalah dengan pertimbangan beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk
- b. Lulusan SLTP yang belum tertampung
- c. Topografi
- d. Permukaan jalan terluas
- e. Angkutan umum utama

Kebutuhan dan penempatan satu USB SMA di wilayah Kecamatan Bandongan dapat dilihat pada tabel IV.11 sebagai berikut :

**TABEL IV.11**  
**KEBUTUHAN DAN PENEMPATAN USB BARU SMA DI WILAYAH**  
**KECAMATAN BANDONGAN**

No	Desa	Jumlah Penduduk	Lulusan SLTP yg belum tertampung	Topografi	Permukaan jalan terluas	Angkutan umum utama
1	Sukosari	1.949	0	Datar	Aspal	Ojek spd mtr
2	Kedungsari	2.329	0	Datar	Aspal	Ojek spd mtr
3	Salamkanci	3.856	1	Datar	Aspal	Roda 4
4	Banyuwangi	5.336	0	Datar	Aspal	Ojek spd mtr
5	Trasan	6.988	0	Datar	Aspal	Roda 4
6	Bandongan	6.888	0	Datar	Aspal	Roda 4
7	Sukodadi	2.186	0	Datar	Aspal	Ojek spd mtr
8	Tonoboyo	2.895	0	Datar	Aspal	Roda 4
9	Kebonagung	2.527	0	Datar	Aspal	Roda 4
10	Kalegen	2.553	0	Datar	Aspal	Roda 4
11	Ngepanrejo	4.215	0	Berbukit-bukit	Diperkeras	Ojek spd mtr
12	Gandusari	4.089	0	Datar	Aspal	Ojek spd mtr
13	Sidorejo	3.069	0	Datar	Aspal	Roda 4
14	Rejosari	6.386	1	Datar	Aspal	Roda 4
		55,266				

*Sumber : Hasil Penelitian, 2008*

Berdasarkan tabel di atas penempatan lokasi satu USB SMA untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Rejosari Kecamatan Bandongan dengan pertimbangan sebagai berikut :

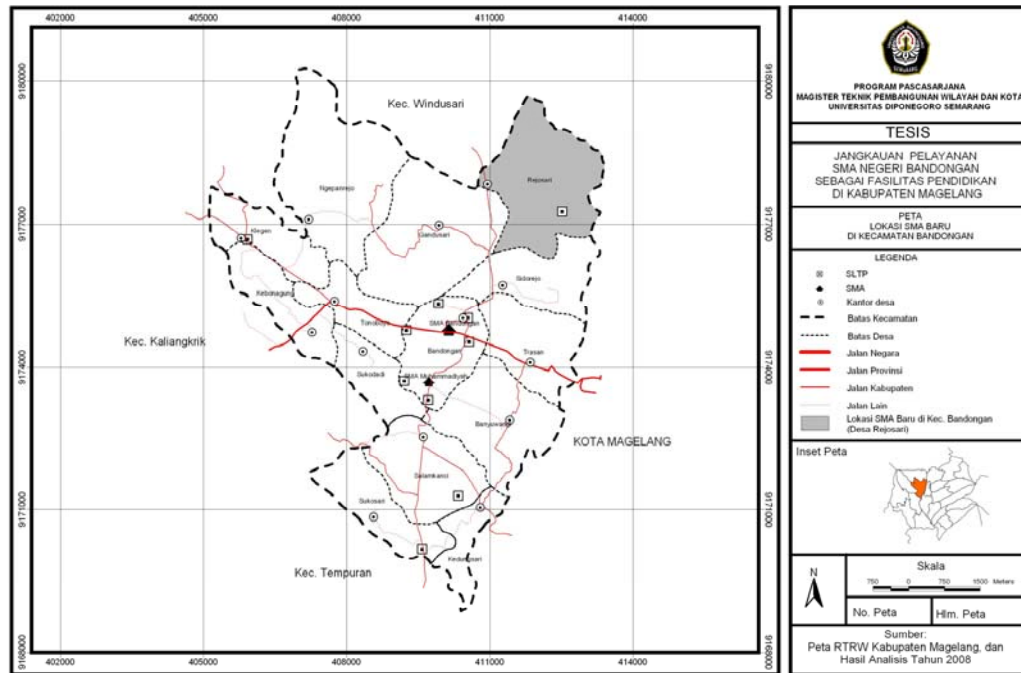
- a. Ada satu lulusan SLTP yang belum terlayani di wilayah tersebut yaitu MTs Ma'arif Rejosari.
- b. Jumlah penduduk Desa Rejosari sebesar 6.386 jiwa, berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan Tahun 2006 satu kelompok permukiman permanen dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMA/MA hal ini berarti di wilayah desa Salamkanci memenuhi persyaratan untuk didirikan satu Unit Sekolah Baru.
- c. Topografi Desa Rejosari datar dengan permukaan jalan terluas sudah aspalan dan transportasi menuju sekolah mudah dan lancar.

Kebijakan penataan ruang daerah berupa upaya untuk meningkatkan fungsi dan peran kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah, pemanfaatan wilayah strategi pertumbuhan stagnan, konservasi, dan wilayah perbatasan, bagi kepentingan pembangunan regional, serta peningkatan efisiensi dan efektifitas system sarana dan prasarana wilayah untuk menjamin keterkaitan yang semakin erat antara pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah dibelakangnya, pusat-pusat distribusi dan produksi, dan keserasian pembangunan antar kota dan kota dengan desa.

Dasar kebijakan Rencana Program Prasarana Pendidikan Kabupaten Magelang adalah berdasarkan Program Jangka Panjang, Program Jangka Menengah dan Program Jangka Tahunan. Dalam rangka peningkatan mutu kualitas pendidikan, sesuai dengan Visi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang yaitu “Mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat melalui perluasan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, menuju masyarakat modern dan beradab”.

Kebijakan pendidikan (*educational policy*) menurut Carter V Good (1959) sebagai suatu pertimbangan (*judgement*) yang didasarkan atas sistem nilai (*values*) dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat lembaga, artinya pendidikan diselenggarakan secara formal pada satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman dan arah untuk mengambil keputusan agar tujuan yang bersifat lembaga dapat dicapai secara optimal (Imron, 1996:18).

Pemilihan Lokasi Sekolah apabila dibuka Unit Sekolah Baru SMA untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Kecamatan Bandongan dan sekitarnya dapat dilihat dalam Gambar 4.6. sebagai berikut :



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. Kesimpulan**

Kebutuhan dan Jangkauan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Daya tampung SMA Bandongan yang melebihi kapasitas , APK Kecamatan Bandongan rendah, APM Kecamatan Bandongan rendah, angka melanjutkannya terus meningkat, jangkauan pelayanan yang menjangkau sampai keluar wilayah maka Kecamatan Bandongan masih sangat membutuhkan pengembangan fasilitas pendidikan yaitu menambah Ruang Kelas Baru (RKB)
2. Jangkauan pelayanan SMA Negeri Bandongan berdasarkan asal SLTP dan radius / jarak tempuh menuju lokasi sekolah sudah bisa menjangkau wilayah di kecamatan setempat bahkan sampai ke luar kecamatan yaitu sampai ke Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Windusari, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Secang dan Kota Magelang. Hal ini sesuai dengan teori tempat pusat. Kondisi ini ditunjukkan dengan adanya jaringan jalan baik dan transportasi menuju ke SMA Negeri Bandongan mudah dan lancar. Namun di wilayah Kecamatan Bandongan masih ada 2 lulusan SLTP yang belum bisa terlayani yaitu dari MTs Ma'arif Rejosari dan MTs Roudl Salamkanci.

3. Daya tampung SMA Bandongan yang melebihi kapasitas , wilayah Kecamatan Bandongan dapat terlayani oleh SMA Negeri Bandongan bahkan wilayah jangkauan pelayanan ini sampai keluar wilayah Bandongan sehingga Kecamatan Bandongan masih membutuhkan penambahan satu Unit Sekolah Baru ( USB ) SMA untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Penempatan lokasi USB SMA Kecamatan Bandongan yaitu di Desa Rejosari. Karena Desa Rejosari jumlah penduduknya banyak, ada lulusan SLTP di Desa Rejosari yang belum terlayani di Kecamatan Bandongan, dan transportasi menuju lokasi Desa Rejosari mudah dan lancar.

## **5.2. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa rekomendasi yang diusulkan adalah sebagai berikut :

- a. Perlu penambahan ruang kelas baru SMA Bandongan untuk menampung kelebihan siswa.
- b. Perlu didirikan Satu Unit Sekolah Baru SMA di Desa Rejosari Kecamatan Bandongan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Kabupaten Magelang dalam Angka Tahun 2006.

Badan Standar Nasional Pendidikan, Standar Sarana Prasarana Sekolah tahun 2006

Bingham RD and Robert M, 1993, *Theorities of Local Economic Development*, London, Sage Publications.

Bintarto, *Metode Analisa Geografi*, LP3ES, Jakarta, 1982.

Blair, John P. 1995, *Local Economic Development, Analysis and Practice*, London, Sage Publications.

Catanese, Anthony J. Catanese, James C. Snyder, *Perencanaan Kota*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 1988

Daldjoeni,N, *Geografi Kota dan Desa*, Alumni, Bandung, 1997

Glasson John dalam Sitohang Paul, *Pengantar Perencanaan Regional*, LPFE, UI, Jakarta, 1990

Hadi Sabari Yunus, *Struktur Tata Ruang Kota*,Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2005

Haggett, Peter, 1968, *Locaional Analysis In Human Geography*, London, Edward Arnold LTD

Husaeni Usman, *Manajemen : Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara, 2006.

*Profil Pendidikan Kabupaten Magelang tahun 2005/2006*

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005, *Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Propinsi Jawa Tengah*.

Pemerintah Kabupaten Magelang, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang tahun 2001 – 2010*.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 *Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom*.

Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005.

Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

Sinulingga, Budi D, *Pembangunan Kota, Tinjauan Regional dan Lokal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005

Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Alfabeta Bandung, 2006

Udin Syaefudin Sa'ud., Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Otonomi Daerah*.

United Nations, *Guidelines for rural centre planning*, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, New York, 1979.